



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

| | |
|----------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat Ke | : 14 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 14 April 2020 |
| Waktu | : 13.00 s.d 16.10 WIB |
| Tempat | : Kantor/rumah masing-masing (Rapat Kerja Virtual) |
| Ketua Rapat Acara | : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) : Melanjutkan Rapat Tanggal 6 April 2020, membahas Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan. |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI) |
| Hadir | : A. Anggota DPR RI: 42 dari 55 orang Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 7 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 4. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 5. DR. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 6. Maria Lestari, S.Pd. 7. Riezky Aprilia, S.H., M.H. 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 4 dari 8 orang Anggota 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua 2. Ir. Ichsan Firdaus |

3. Budhy Setiawan
4. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

5 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
3. H. Charles Meikyansah
4. Yessy Melania, S.E.
5. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. H. Muhtarom, S.Sos.
2. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A
3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
4. Drs. H. Ibnu Multazam
5. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
4. Muslim, S.Hl., M.M.
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

5 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.

3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. K. H. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah

1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Komjen Pol. Antam Novambar (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Muhammad Yusuf (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya, serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat walau kita memakai virtual.

Sesuai dengan jadwal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, tanggal 27 Maret 2020 dan keputusan Rapat Internal tanggal 31 Maret 2020. Pada hari ini Selasa, tanggal 14 April Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merupakan kelanjutan dari Raker tanggal 6 April 2020 dalam rangka membahas recofussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan.

Bapak/Ibu yang terhormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)

Rapat Kerja hari ini dimulai pada pukul 13.00 dan akan diakhiri pada pukul 16.00. Apabila belum selesai, sesuai dengan Tatib Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Menteri Kelautan,
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dalam Rapat Kerja ini merupakan lanjutan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Dimana telah menyepakati kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi IV menerima penjelasan refofussing kegiatan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional.
2. Komisi IV mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bansos atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat terutama nelayan budidaya ikan, petambak garam dan pengelola, pemasaran hasil perikanan yang terkena dampak COVID-19 sebesar lebih kurang 500 Miliar dari pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.
3. Komisi IV mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan program-program penyanggah produksi komoditas perikanan, pergaraman dan memenuhi kebutuhan pangan nasional terutama ikan serta memberikan paket stimulus ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, seperti kemudahan restrukturisasi pinjaman UMKM, Unit Pengolahan Ikan (UPI), eksportir serta masyarakat yang kena dampak COVID-19 dalam rangka pemulihan ekonomi.

Namun dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan belanja negara Tahun Anggaran 2020 maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyesuaian yang semula Rp6.448.661.749.000,- menjadi Rp5.300.705.838.000,-.

Untuk itu Komisi IV ingin meminta penjelasan secara rinci strategis program yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam situasi saat ini yang dimana korban wabah COVID-19 terus meningkat. Namun disaat yang sama kebutuhan pangan yakni sumber protein ikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Disisi lain perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku utama perikanan yakni nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengelola pemasar hasil perikanan wajib dilakukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang ini.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasan terakhir hal-hal tersebut diatas.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dr. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Ijin Pak Menteri.

Ada yang ingin saya tanyakan, adakah info hari ini setelah rapat dengan Presiden Republik Indonesia untuk disampaikan pada Rapat Kerja ini biar kami mengetahuinya.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Nanti kami sampaikan Pak.

Ijinkan kami menyampaikan pengantar dahulu.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

*Om Swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam Kebajikan.*

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, para Pejabat Eselon I beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semuanya telah tersambung secara virtual pada siang hari ini. Khusus kami KKP hadir lengkap diruangan ini Pak Ketua walaupun tetap harus menjaga jarak.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan Rapat Kerja virtual antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI yang merupakan Rapat Kerja lanjutan tanggal 6 April 2020 membahas *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghematan anggaran sebesar 1 Triliun koma 147 Miliar. Sehingga pagu KKP dari 6 Triliun 448 Miliar menjadi 5,3 Triliun. Didalam Perpres tersebut KKP diminta tetap mempertahankan anggaran pendidikan Tahun 2020 sebesar 485,69 Miliar. Sedangkan untuk target PNB sumber daya alam pendapatan perikanan tetap sebesar 900,35 Miliar dan PNB lainnya tetap sebesar 144,63 Miliar.

Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pergeseran anggaran untuk mendukung kegiatan pada Dirjen Perikanan Budidaya dan memenuhi amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* kami mengusulkan perubahan pagu per Eselon I sebagai berikut:

1. Pagu Dirjen Perikanan Tangkap berkurang 159,42 Miliar dari semula 657,46 Miliar menjadi 498,04 Miliar.
2. Pagu Dirjen Perikanan Budidaya berkurang sebesar 245,52 Miliar dari semula yang kita sudah tambahkan 300 Miliar menjadi semula 1,039 Triliun menjadi 794,05 Miliar.
3. Pagu Dirjen PDS berkurang sebesar 101,99 Miliar dari semula 321,02 Miliar menjadi 219,02 Miliar.
4. Pagu Dirjen TRL berkurang sebesar 185,82 Miliar dari semula 469,85 Miliar menjadi 284,03 Miliar.
5. Pagu Dirjen PSDKP berkurang sebesar 258,29 Miliar dari semula 1,005 Triliun menjadi 747,58 Miliar.
6. Pagu BRSDMKP berkurang sebesar 31,33 miliar dari semula 101,773 Triliun menjadi 1,741 Triliun.
7. Pagu BKIPM berkurang sebesar 72,82 Miliar dari semula 586,07 Miliar menjadi 513,25 Miliar.
8. Pagu Setjen berkurang sebesar 84,75 Miliar dari semula 510,32 Miliar menjadi 425,57 Miliar.
9. Pagu Intjen (Inspektur Jenderal) berkurang menjadi 8 Miliar dari semula 85,26 Miliar menjadi 77,27 Miliar.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Menindaklanjuti kesimpulan hasil Rapat Kerja DPR RI tanggal 6 April 2020 untuk melakukan peningkatan anggaran pada bantuan Pemerintah kepada masyarakat kelautan dan perikanan. KKP telah melakukan realokasi anggaran dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak *COVID-19* di sektor perikanan dan kelautan sebesar 483,74 Miliar atau sekitar 9,12% dari total APBN KKP Tahun 2020 yang dialokasikan antara lain untuk kegiatan: bakti nelayan, bantuan benih tawar, payau, bantuan benih laut, bantuan induk, bantuan bibit rumput laut, bioflog, mina padi, pembangunan irigasi, ... ikan hias, asuransi usaha budidaya, bantuan pakan, mesin pakan mandiri dan

bahan baku, percontohan budidaya magot di UPT dan juga di masyarakat, bantuan sarana mendukung revitalisasi tambak, bantuan sarana budidaya laut, model cluster sentra budidaya rumput laut, sarana sistem rantai dingin (*chest freezer*), perluasan gemar ikan dan promosi gemar ikan, pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR), rehabilitasi kawasan mangrof, pelatihan masyarakat KP dan bulan bakti karantina ikan.

Selanjutnya, rencana kerja anggaran pada APBN Perubahan Tahun 2020 pada masing-masing unit kerja Eselon I secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Dirjen Perikanan Tangkap, bakti nelayan, pelayanan ijin, penambahan syah bandar, dan operasional UPT pelabuhan dan SKPT.
2. Ditjen Perikanan Budidaya. Bantuan benih dan calon induk, bantuan sarana- prasarana dan percontohan budidaya, bantuan pakan, percontohan budidaya magot, revitaliasasi tambak udang, dan bandeng, dan model cluster komoditas unggulan.
3. Ditjen PDS, bantuan *chest freezer* dan perluasan program gemar ikan.
4. Ditjen PRL. Sarana-prasarana pesisir, dan pulau-pulau kecil, pugar, bantuan kompak (kelompok masyarakat konservasi) dan rehabilitasi kawasan mangrof.
5. Ditjen PSDKP. Operasional kapal pengawas, peggadaan kapal pengawas dan penanganan kasus tindak pidana perikanan.
6. BRSDM. Pendidikan pokasi, pelatihan masyarakat, penyuluhan, stok asesment dan riset kelautan dan perikanan.
7. BKIPM, penanganan kasus pelanggaran karantina, pengawasan mutu produk, dan bulan bakti karantina.
8. Sekretariat Jenderal. Penyiapan produk hukum perencanaan, keuangan, humas, aparatur, data statistik, dan operasional LPMUKP.
9. Itjen (Inspektorat Jenderal). Pengawasan akuntabilitas disetiap unit kerja Eselon I KKP.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 KKP mengusulkan paket stimulus ekonomi disektor kelautan dan perikanan antara lain:

1. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, atau pemasar, dan petambak garam sebesar 1,024 Triliun berupa paket pembekalan melaut untuk nelayan, paket input sarana produksi, paket peralatan pengolah sederhana, dan peralatan pemasaran dan *cash ...* atau padat karya tunai dari dan sarana-prasarana untuk PUGAR.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah atau pemasar, dan petambak garam sebesar 600 Ribu per bulan selama 3 bulan melalui Kementerian Sosial.
3. Pembelian produk perikanan oleh BUMN perikanan dimana ikan hasil pembelian selanjutnya menjadi bagian dari program bantuan pangan non tunai bagi masyarakat terdampak berdasarkan data keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan.

4. Penurunan bea masuk ... dan kaleng jadi serta pasta tomat dan tepung pengental saos sebagai bahan baku industri pengalengan ikan.
5. Pembelian garam hasil petambak garam rakyat oleh BUMN. Dalam hal ini PT Garam dengan memanfaatkan gudang garam nasional dan gudang garam rakyat serta pemberian subsidi biaya transportasi garam dari tambak ke gudang garam rakyat.
6. Perluasan cakupan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona dengan memasukkan kegiatan industri kelautan dan perikanan.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mohon persetujuan lebih lanjut terhadap pergeseran dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan usulan stimulus ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Seluruh saran, masukan dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai tambahan Bapak Pimpinan, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV. Sebelum kita Rapat Kerja hari ini kami baru saja Rapat Paripurna Kabinet yang dipimpin Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Yang intinya adalah mendengar laporan Menteri Keuangan terhadap ekonomi global, kemudian program anggaran APBN Tahun 2021, kemudian refocussing anggaran. Dari yang sudah kita lakukan *refocusing* yang kami laporkan ke Pak Ketua memang dilaporkan juga ada kemungkinan untuk memotong anggaran Kementerian-Kementerian kembali bagi secara khusus yang benar-benar tidak perlu atau tidak penting bagi hal-hal yang sama sekali masih perlu ditunda, yang bisa ditunda. Bagi yang bisa ditunda dengan konsep multiyears tidak ditunda tapi di jamak di tahun jamak itu akan diatur nanti. Namun detailnya masih menunggu dari Kementerian Keuangan lebih lanjut.

Kami mohon Bapak/Ibu, Bapak Ketua, dan para Wakil Ketua karena kami rasa anggaran yang ada pada kami ini sudah sangat minimal. Dan yang paling penting Pak Ketua dalam kondisi yang kita hadapi ini ada 2 kemungkinan yang terjadi bagi seluruh dunia. Mau jadi pemenang, atau mau jadi pihak yang kalah. Dan saya sangat yakin Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menjadi pihak yang menang. Kelompok yang bisa diuntungkan, kelompok yang bisa mendapat peluang. Kenapa Pak Ketua, sesulit apa pun yang kita hadapi sekarang semua orang tetap akan butuh makan. Seluruh dunia bisa tutup restoran, bisa tutup tempat makan, warteg tutup, warung-warung tutup, pecel lele tutup tapi merek tetap akan makan dari rumah. Dan kebutuhan yang mereka makan salah satunya adalah ikan. Ikan adalah komoditas yang secara kesehatan, secara nyata merupakan yang tempat yang dicari, merupakan komoditas yang sedang dicari. Salah satu bukti Pak Ketua dan teman-teman semua, para Ibu yang saya hormati, ekspor

yang kami lepas beberapa kali baik secara langsung maupun dapat laporan pengakuan dari para pengusaha, permintaan terhadap produk-produk perikanan mereka ke negara-negara yang katanya paling luas terjangkau COVID. Mereka masih memesan cukup besar bahkan cenderung meningkat. Itali sebagai misal. Artinya kami melihat ini adalah peluang buat kita.

Pak Ketua,

Hal lain yang akan kita hadapi adalah setelah menghadapi COVID lapangan pekerjaan akan semakin sulit. Di KKP dengan kekuatan yang dengan rencana yang sudah kami laporkan kepada Pak Ketua membangun sentra perikanan budidaya adalah peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kami sudah dan kami akan segera membangun beberapa simulasi dan sentra-sentra yang akan kami bagi tambak-tambak udang wilayah budidaya menjadi ke cluster-cluster yang lebih kecil. Karena kalau kita membagi membangun tambak itu ongkosnya akan mahal Pak Ketua. Hanya orang kaya yang bisa membangun tambak karena biaya tambaknya itu sendiri kalau pun dia sudah punya lahan untuk membangunnya saja secara intensif dia akan butuh minimal 1 Miliar. Bahkan untuk ongkos produksinya. Kita bicara intensif Pak Ketua dengan asumsi 1 kali panen 25 ton itu butuh biaya 750-an Juta. Tapi pendapatannya bisa 2 kalinya. Potensinya sangat besar, tapi kalau kita mengandalkan dengan anggaran perorangan sangat tidak mungkin.

Makanya peran negara lah disini Dengan simulasi yang akan kami bangun ini sudah diperiode ini kami akan bangun percontohan-percontohan dan mudah-mudahan ini Pak Ketua dan teman-teman Anggota Komisi IV juga ikut melihat langsung. Kami akan mencoba cluterisasi, baik itu berupa tambak udang secara konvensional berupa lahan tapi juga tambak udang berupa bioflog. Ada salah satu cluster yang akan kita coba 60 lubang. 1 bioflog sebesar sepanjang 20 diameternya, kira-kira luasnya 314 meter persegi ya Pak Slamet. Itu dihitung 1 bioflog itu akan memberikan pendapatan maksimal 5 Juta kepada para pemilik bioflog itu. Saya tidak berpikir seoptimis itu Pak Ketua. Saya hanya berpikir cukup setengahnya saja. Kalau ini bisa kita capai, karena ongkos tenaga kerjanya sudah termasuk diluar itu.

Sehingga saya sangat optimis kalau ini berhasil dan kita bisa buktikan dalam 3 bulan setengah kedepan minimal 4 bulan atau 5 bulan. Saya sangat yakin 1 cluster yang kita bangun itu 1 model ada 5 hektaran. 5 hektar itu untuk 30 sampai 40 KK. Dengan biaya yang tidak begitu mahal Pak Ketua, 1 cluster itu biayanya 5 sampai 6 Miliar ini data yang kita hitung. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak akan meleset.

Pak Ketua,

Kami sudah laporkan kepada Presiden secara prinsip Beliau mendukung tapi saya juga harus laporkan kepada pengawas kami Bapak/Ibu semua Anggota Komisi IV. 2 pola ini satu komoditas saja kita berbicara. Bisa dibayangkan kalau kita bisa melakukan di 5 hektar ada penyerapan tenaga kerja paling minimal 50, 40 atau bahkan 30, per 30 KK ini Pak Ketua bukan

orang, KK. Bisa dibayangkan kalau kita bisa buka ini secara masif di Indonesia. Peluang pasar dunia membutuhkan udang segar 13 juta ton. Indonesia baru mampu memenuhi 800 ribuan ton udang bahan baku. Belum lagi kita hitung potensi tambak udang-udang yang ideal. Pak Ketua, saya yakin sebagai ahli disektor ini juga yang sudah lama mengawasi dan

Bapak/Ibu semua. Banyak tambak-tambak udang ideal di Indonesia. Kalau ini secara fakta kita bisa buktikan, kita bisa hidupkan saya yakin peluang lapangan pekerjaan ada disini. Kalau yang lain agak pesimis, dunia lain boleh pesimis, kita tidak boleh pesimis. Dan kami tidak akan pesimis karena potensinya sangat besar. Masyarakat ingin makan. Udang ini salah satu komoditas. Masih banyak komoditas lainnya. Bisa saja komoditas air tawar, payau, bahkan ditengah laut kita ada semua.

Makanya Pak Ketua, kami tidak pernah berhenti, kami tidak pernah lelah walaupun harus kerja dari rumah. Sekarang saja kami mengalami kesulitan untuk kunjungan ke luar daerah. Karena memang ada pelarangan-pelarangan yang terpaksa yang memang harus kita ikuti sebagai contoh kepada masyarakat. Namun kami menggantikannya dengan virtual. Bisa cukup efektif dan memang belum tidak seperti kita kunjungan langsung.

Pak Ketua,

Pengawasan kami ditengah laut pun tidak pernah berhenti. Dalam 1 minggu ini kami sudah menangkap 6 buah kapal. 3 kapal diperairan Sulawesi Utara, 3 kapal di Selat Malaka, dan Natuna. Sehingga total kapal yang kami tangkap selama kami menjabat sebagai Menteri dengan Tim yang begitu kompak saat ini ada 27 kapal. Kapal-kapal itu berhasil kami daratkan dan Inshaa Allah kedepan kami akan menuntut dan akan diserahkan ke negara akan eks *officio* dikembalikan diserahkan kepada KKP dan ini yang akan kita bisa memanfaatkan. Kalau dari angka yang kita hitung Pak Ketua 27 kapal ini kapal ini, kita sudah bisa mengumpulkan uang. Mungkin kalau tidak salah sekitar 200-an Miliaran kalau di Rupiahkan. Belum termasuk hasil tangkapan yang mereka berhasil kita sita.

Pak Ketua yang saya hormati,

Kami tahu dalam kesulitan ini. Saya percaya kita bisa hadapi semua hanya dengan semangat yang Bapak/Ibu berikan kepada kamilah kami terus akan kerja keras.

Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami pada kesempatan yang berbahagia ini mendapat pencerahan. Dari Bapak Ketua mendapat arahan, dari para Bapak/Ibu sekalian yang terhormat semoga semangat kami terus maju dan menggebu-gebu. Hadir lengkap kami disini, Bapak Dirjen Budidaya, Inspektur Jenderal, ada Sekjen, ada Direktur Perikanan Tangkap, ada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, ada Kepala Badan Karantina, ada Kepala Dirjen Penguatan Daya Saing, ada Dirjen PRL, dan Dirjen PSDKP, serta ada staf ahli Menteri, dan staf khusus Menteri.

Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih atas waktunya.

Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi apa yang kami lakukan adalah upaya mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dan saya yakin sekali lagi Pak Ketua, sektor dibawah pengawasan Bapak/Ibu semua salah satunya di KKP merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat kita, bahkan kebutuhan dunia saat ini.

Demikian.

Saya akhiri.

*Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamuallaikum Waramatullahi Wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

*Om Shanti Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Budhaya.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas sambutannya Saudara Menteri KKP. Saya sangat mengapresiasi sekali. Dalam minggu ini PSDKP sudah bisa menangkap 6 kapal asing. Maka saya sarankan kepada Saudara Menteri, tolong sekali lagi saya ingatkan tolong diperhatikan lebih baik lagi kesejahteraan alat kapal patroli maupun petugas dilapangan, karena mereka adalah garda terdepan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Terutama dalam menjaga sumber daya alam laut kita.

Kemudian yang kedua Saudara Menteri, kemarin saya ditelepon oleh Bupati Pulau Morotai. Yang bersangkutan sudah bicara dengan Saudara Menteri perihal pembangunan *cold storage* untuk di Kabupaten Pulau Morotai. Yang mana? Kita tahu apabila disana tidak dibangun *cold storage* maka nelayan bisa menangkap tapi tidak bisa menjual. Saran saya terutama wilayah-wilayah yang banyak menghasilkan tangkapan ikan oleh nelayan kecil. Itu terima kasih Pak Menteri.

Selanjutnya silakan Anggota. Saya minta yang terhormat para Anggota tidak usah basa-basi, langsung singkat, jelas dan mudah dimengerti.

Yang pertama yang mewakili Fraksi PDI-Perjuangan Kapoksinya.

Silakan Pak Sunarna.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Assalaamu'alaikum.

Pak Ketua yang saya hormati, para Anggota, dan juga Bapak Menteri beserta seluruh Pejabat KKP yang saya hormati, saya banggakan.

Semoga Pak Ketua dan Pak Menteri juga seluruh Pejabat KKP diberikan sehat wal'afiat jauh dari wabah ini.

Pak Menteri yang saya hormati.

Terima kasih tadi atas paparannya yang sangat luar biasa. Kami hanya sedikit akan menyampaikan terkait dengan penanganan corona dan pengalihan anggaran ini.

Pak Menteri yang saya hormati,

Pertama bahwa, benar bahwa kebutuhan pangan khususnya ikan. Biar pun restoran dan yang lain-lain itu banyak yang tutup bahwa kebutuhan rumah tangga tetap membutuhkan khususnya produksi dari ikan. Nah Pak Menteri, tentu ini menjadi pemikiran bersama bagaimana alur distribusi. Alur distribusi ini sangat penting sekali dalam rangka kondisi wabah seperti saat ini. Kendala-kendala disana yang membuat harga itu tidak jelas adalah alur distribusi. Tentu distribusi ini harus dipikirkan juga oleh Pak Menteri dan juga jajarannya.

Selanjutnya Bapak Menteri, terkait awal-awal panen pada saat ini panen ikan baik tawar maupun juga tambak ada penurunan harga. Karena penurunan permintaan. Kami sangat mengharapkan hasil panen ini bisa diakomodir oleh Kementerian KKP sehingga nantinya bisa untuk pelaksanaan program. Karena saya yakin, KKP sendiri. Negara kita masih impor ikan. Tentu kita akan masalah juga nantinya beberapa hari yang akan datang tentu kita adalah pangan yang akan merasa sulit, karena negara lain pun juga akan merasakan hal yang sama Bapak Menteri.

Terkait dengan tambak-tambak udang dan yang lain-lainnya, kami sangat mengharapkan bagaimana stabilitasi harganya Pak Menteri biarpun dalam kondisi wabah ini stabilitas harga juga masih menjadi perhatian dari Kementerian KKP. Jangan sampai baik tambak, baik tawar, payau, mereka merasakan sulit dan mereka tidak merasa untung dan mereka harganya jatuh pada saat ini Pak Menteri. Terkait dengan, satu terkait dengan fungsi, dua penurunan harga, dan seperti apa untukantisipasi pangan khususnya ikan yang nantinya apabila corona ini virus *COVID-19* ini akan terus berlanjut. Mungkin saya yakin itu saja Bapak Ketua. Sedikit yang kami sampaikan untuk Bapak Menteri. Kami sangat mengharapkan penanganan yang jelas dalam rangka alur distribusi pangan khususnya hasil dari perikanan.

Terima kasih Pak Ketua, Bapak Menteri, para Pejabat KKP yang saya hormati. Semoga doa kami sehat semuanya, bagas waras bermanfaat untuk negara dan bangsa kita. Selamat berjuang.

Merdeka!.

Wassalamuallaikum Waramatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Gerindra.

Kanjeng silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Pak Menteri, para Dirjen yang saya hormati, Eselon I, Pak Ketua, dan para Wakil Ketua, dan Anggota yang terhormat.

Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri dan cukup memahami adanya pagu dari 6,4 Triliun dengan adanya Perpres 54 Tahun 2020 jadi menjadi 5,3. Setelah saya lihat rinciannya sudah memadai. Saya kira rincian daripada kekurangan atau *recofusing* dari Eselon I menurut pendapat kami sudah baik. Dan tadi Pak Menteri juga menyampaikan hasil Sidang Kabinet pagi tadi Kemungkinan adanya pengurangan lagi maka melalui Komisi IV mohon kiranya anggaran KKP tidak dikurangi lagi, adanya rekomendasi dari kita karena anggaran sudah semakin kecil.

Terus yang kedua, dalam rangka *recofusing* mengenai kebutuhan pangan. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ada disisihkan atau pun dianggarkan 483,7 Miliar. Setelah kami dalami, kami pelajari bahwa yang menyentuh langsung dengan masyarakat nelayan, petani, dan masyarakat lainnya itu baru ada gemar makan ikan sama promosi gemar makan ikan. Itu dananya tidak banyak, hanya kurang lebih 15%. Apakah memungkinkan Pak Menteri dari anggaran yang 483 ini sebagian lagi digeser lagi yang bisa menyentuh langsung dalam waktu 3 bulan ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk menambah mendukung pangan yang ada.

Selanjutnya Pak Menteri, dengan cara menggeser kegiatan-kegiatan yang mungkin masih bisa ditunda untuk periode yang akan datang.

Selanjutnya mengenai pengembangan usaha garam rakyat Pak Menteri, kami usulkan bahwa di pantai Jawa Tengah khususnya Pantai Selatan bahwa didaerah kami Pantai Kebumen adalah daerah terpandang pantainya dan sudah terbukti telah diadakan percobaan oleh teman-teman dari KKP dan sudah ditinjau oleh beberapa Dirjen dan Eselon II bahwa garam di Pantai Kebumen itu sangat baik dan warnanya bagus putih. Ya mungkin yang kami inginkan pertama agar betul-betul karena masyarakat menanyakan, apakah kalau kita usaha garam ini untung? Mohon kiranya ada analisa keuangan biaya pembuatan garam yang ada sekarang ini berapa, jangan sampai rugi. Terus yang kedua, untuk meningkatkan mengatasi kemiskinan Nomor 1 di Jawa Tengah. Itu Kebumen itu termiskin No. 1 di Jawa Tengah, mohon kiranya anggaran yang 300 hektar sebagian dialokasikan untuk daerah Kabupaten Kebumen.

Demikian Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PKS.

Pak Johan Rosihan, silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Pak Ketua yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Minta izin Pak Kapoksi duluan disuruh sama Pak Ketua ini. Pertama, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri KKP yang begitu sabar menerima penghematan dari Rapat Kabinet. Kalau ada Rapat Kabinet berikutnya Pak Menteri, tolong sampaikan pidato yang terakhir tadi. Salam kami juga dari Komisi IV ke Pak Presiden, ke Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang lain. Kalau masih mau makan ikan, tolong jangan dipotong anggaran KKP ini. Karena masyarakat kita butuh ikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Itu yang pertama. Apresiasi dan keprihatinan Pak Ketua.

Yang kedua, tadi sudah disinggung sama Pak Kanjeng tentang gemar ikan. Saran saya sama dengan Beliau.

Yang berikutnya, dari data yang diberikan soal BLT. Tolong Pak Menteri jangan terlalu tergantung dari data yang ada di Kemensos. Saya berharap di KKP sendiri ada Tim Khusus yang mendata ini agar kita benar-benar tepat sasaran dan bantuan dari KKP itu pas sarannya kepada masyarakat nelayan kita, para petambak garam, petambak ikan, dan stakeholder KKP lainnya.

Nah untuk itu Pak Menteri, Pak Ketua yang saya hormati.

Komisi IV dan seluruh Anggotanya bisa dilibatkan untuk itu. ... kita punya jaringan-jaringanlah masyarakat nelayan tahu kita. Karena jangan sampai kalau ... nanti sudah kena program PKH, sudah pernah program ini segala macam, kena lagi dia. Nah mohon ada khusus dia nih, ada pendataan khusus dari KKP terhadap stakeholder perikanan kita.

Yang berikutnya saya ingin bertanya Pak Menteri, apa kira-kira langkah-langkah dan kebijakan di KKP dalam memberikan insentif khusus bagi dunia usaha dibidang perikanan ini termaksud juga tentang industri

garam nasional kita. Kebetulan di tempat saya sama Pak Rudi ... itu ada 2 atau 3 titik pusat garam yang ada juga gudang garam nasional ada disitu.

Yang berikutnya yang terakhir mungkin. Apa langkah-langkah percepatan Pak Menteri untuk mempercepat proses ekspor dan peningkatan layanan ekspor, dan peningkatan volume ekspor dibidang kelautan dan perikanan terutama dalam 5 komoditas ekspor kita. Ada tuna, tongkol, cakalang, ada rajungan, ada segala macam dan rumput laut. Nah mungkin itu.

Dan yang terakhir adalah kami meminta supaya KKP juga ada mendata ya. Mendata, ada potensi PHK di anggota kapal perikanan kita. Tolong ini kemudian didata dan kita bisa memberikan bantuan kesitu agar. Saya sampaikan ini Pak Menteri, karena pasca *COVID* ini nelayan kan tetap jadi nelayan. Tidak mungkin dia menjadi pekerja yan lain. Petambak garam juga. Mau ada *COVID*, mau tidak ini pekerjaan mereka. Nah karena kita harus menjaga agar mereka tetap bisa melaut, tetap bisa berusaha dibidang perikanan ini.

Terakhir, bantuan-bantuan langsung pada masyarakat itu tolong segera dicairkan biar 3 bulan ini biar masyarakat bisa merasakan dampak keberadaan Pemerintah melalui Menteri KKP agar mereka merasa tidak sendiri dalam menerima nasib dengan *COVID-19* ini.

Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Teman-teman Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Tadi pagi saya sudah memberikan gambaran tentang bantuan langsung dari Kementerian KKP kepada rakyat. Ada 3 pelaksanaannya, 1. Gemar makan ikan. 2. Bulan bakti nelayan, 3. Bulan mutu karantina. Ini yang menentukan semuanya Anggota Komisi IV. Tolong dibaca, dibuka yang tadi saya *forward*, dilihat. Nanti suruh staf ahlinya menghubungi staf ahli kita untuk dijadwalkan pembagiannya. Jadi ada 3 dari gemar makan ikan, bulan bakti nelayan, dan bulan mutu karantina. Ini penjelasannya. Tolong nanti dilihat secara jelas.

Selanjutnya yang mewakili Partai Golkar, Bapak Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, tidak ada namanya Firdaus. Namanya Ichsan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Namanya Pak Ichsan Firdaus. Maaf.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Selamat siang, dan salam sejahtera buat semua.

Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, para Pejabat Eselon I, dan Pak Ketua, para Wakil Ketua yang di virtual.

Saya hanya sedikit saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kekhawatiran akan terjadi pemotongan lagi. Nah yang perlu kita antisipasi.

Pak Menteri kedengaran? Baik.

Terima kasih Pak Menteri.

Yang saya hormati para Ketua dan Pimpinan yang lain, Anggota dan teman-teman lainnya.

Kalau boleh pak menteri terkait *statement* terakhir pak menteri bahwa jika ada masalah dalam beberapa bulan kemungkinan akan ada pemotongan lagi, nah ini yang kita khawatirkan karena bagaimana pun pemotongan ini juga akan berdampak terhadap bagaimana upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung proses *recovery* ekonomi kedepan. saya setuju dengan pak menteri bahwa sektor perikanan setiap krisis ekonomi pasti satu Negara akan sangat tergantung pada *resource* dan sumber dayanya yang ada, terutama *Natural Resource*, nah salah satunya sektor perikanan di dalam rapat ini saya berharap jika seandainya terjadi pemotongan lagi kita harus pegang prinsip-prinsip mana program yang tidak boleh terpotong lagi terutama bagaimana penguatan ekonomi disektor UKM Kelautan dan Perikanan, misalnya tadi saya setuju dengan revalidasi tambak harus berjalan, apapun yang terjadi itu harus berjalan dengan baik, sektor budidaya juga harus berjalan dengan baik, kemudian pengawasan harus juga tidak boleh ada pemotongan lagi pak menteri, tadi juga ada pendidikan juga. Jadi ada beberapa program atau subsektor di KKP ini itu harus punya satu garis bahwa jika seandainya terjadi adanya pemotongan kita tidak boleh mengizinkan pemotongan di beberapa subsektor saya usulkan budidaya, terutama revitalisasi tambak itu juga harus tidak boleh terpotong lagi, pengawasan, operasional. Pengawasan tetap harus berjalan dengan baik terus sama dengan sektor pendidikan karena penguatan SDM, tiga hal itu tidak boleh kita potong lagi. Nah diluar itu maka kita harus melakukan penyesuaian,

termasuk juga saya ingin mengklarifikasi terkait dengan promosi gemar ikan ini, ada perluasan gemar ikan ini, dan promosi gemar ikan ... ini angkanya juga walaupun kecil tetapi ada perbedaan yang satu paket yang satu lokasi.

Saya si tidak mempermasalahkan bahwa perlu adanya perluasan GEMAR IKAN. Tetapi harus diubah polanya karena berkaitan dengan adanya *psychal distancing* selama inikan promosi GEMAR IKAN ini kan kita mengumpulkan orang, mengumpulkan pelaku-pelaku perikanan dalam satu ruangan, karena terkait adanya PSBB dan sebagainya ini, ini harus adanya perbedaan pola. nah disisi lain ada bulan bakti karantina yang kemudian yang saya dengar bulan bakti karantina ini juga membagikan sembako, nah apakah kemudian perluasan GEMAR IKAN ini tidak kita pikirkan juga pak menteri untuk melakukan penguatan para pelaku perikanan yang terdampak dari COVID ini, misalnya saja kalau memang adanya pembagian produk-produk perikanan, kenapa ga promosi GEMAR IKAN kita lakukan seperti itu. Ini yang kedua yang ketiga terkait dengan SKPT, SKPT ini terjadi banyak pengurangan juga, saya pahami juga, satu SKPT ini rata-rata Cuma 1 milyar, apa yang dilakukan disini pak.

Kalau Boleh saya usulkan kita fokus saja pada beberapa SKPT, ini ada sekitar 15 SKPT kita fokus saja, yang lain mungkin tidak perlu terlalu jauh. Nah ini nanti pak menteri juga kalau boleh saya usulkan SKPT ini kita fokus pada SKPT yang memang punya potensi untuk memberikan stimulus ekonomi. Yang selanjutnya, kalau boleh jangan ada tumpang tindih program yang sifatnya *crash program* disitu ada GEMAR IKAN, disitu ada Bulan Bakti Karantina, disitu ada bantuan Bakti Nelayan di Dirjen Perikanan Tangkap, jangan sampai ada satu program atau satu lokasi itu ada dua program. GEMAR IKAN ada 134 Paket, Bulan Bakti Karantina ada 47 Paket, jangan-jangan ini nanti ada *double* anggaran pak, alangkah baiknya program-program seperti itu dijadikan satu program saja, satu program saja "Bulan Bakti Perikanan dan Kelautan". Entah siapa yang menangani tapi itu jauh lebih terkoordinir yang tentunya bentuknya adalah pembelian produk-produk perikanan dan dibagikan kepada masyarakat atau kepada pelaku industri perikanan atau pelaku usaha perikanan, *it's okay*, tapi satu program saja disatukans aja pak menteri, sehingga kami di Komisi IV bisa sama-sama mengawasi juga bisa terlibat, ada 134 Paket ada 47 Paket, Ada macam-macam paket itu, kira-kira ada 300 paket saja itu dijadikan satu saja, sehingga kami mudah untuk mengkoordinasi dan sebagainya.

Itu saja pak ketua, pak menteri terima kasih mudah-mudahan pak menteri tetap sehat dan bisa bertemu di darat sama kita dikemudian hari. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ichsan.

Nampaknya Pak Ichsan belum membaca detail perihal 3 konsep tadi. Yang pertama itu bulan mutu karantina itu diberikan kepada tenaga medis, Pondok Pesantren, ojek online, dan masyarakat sekitar Kantor OPP. Yang bulan bakti nelayan adalah bantuannya sembako dan lain-lain. Satu lagi gemar makan ikan ini baru, itu yang diberikannya adalah makanan olahan dan lain-lain. Jadi beda objeknya ini Pak Ichsan.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PAN.

Pak Rudi silakan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua, Pak Menteri, Plt Sekjen, kemudian Pak Dirjen.

Saya sedikit saja yang tipis-tipis saja karena tadi sudah dibahas oleh teman-teman sekalian. Pak Menteri, para nelayan dibawah itu sudah sangat menunggu BLT dan karena tadi diarahkan oleh Pak Ketua keputusannya ada sama Anggota. Saya minta jajarannya ada kiranya bila ada dalam 1 Dapil itu ada 2 Anggota itu quantitynya jangan disamakan harus bagi 2 atau apa, ini penting. Mumpung ada Pak Menteri dengar dan jajarannya.

Kemudian karena ini sudah berjalan, kita akan berjalan. Mohon bisa disampaikan kepada jajarannya dibawah maksud saya, di Provinsi agar ini tidak tumpang tindih dengan proram Departemen yang lain supaya semuanya dibawah agak enak gitu.

Saya kira itu saja Pak Menteri. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Menteri. Kita tetap bisa bertemu virtual asilnya.

Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih Pak Menteri. Selamat bertugas buat bangsa dan negara.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Ibu Julie dari Fraksi NasDem.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua dan Pak Menteri yang saya hormat, dan Anggota Komisi IV, dan para Dirjen.

Kalau saya lebih melihat bahwa sekarang anggaran banyak yang dipotong untuk membantu penanganan COVID. Tetapi kita tidak bisa lupa bahwa setelah pasca COVID ini terjadi setelah selesai, apakah perekonomian para kita punya nelayan-nelayan dan penambak garam bisa tetap terus berjalan atau nanti berikutnya kita tetap harus ada CSR lagi untuk membantu mereka untuk pulih. Jadi menurut saya adalah saya. Salah satu contoh saya ambil Nusa Tenggara Timur, kebetulan Dapil saya. Di NTT sendiri ada dampak COVID atau tidak pun sebelum ini COVID terjadi para nelayan pun saya rasa juga tidak maksimal diberikan kesempatan untuk berkarya di mereka punya laut. Karena kita tahu persis bahwa NTT itu adalah 60% adalah laut. Tapi para nelayan itu belum sejahtera mendapatkan maksimal dari mereka punya hasil. Jadi menurut saya kesempatan ini anggaran ada pemotongan untuk Bansos atau CSR.

Mungkin saya lebih memilih seperti kayak Dalam arti bukan di CSR-nya saja, tetapi juga anggaran yang akan diturunkan berbentuk CSR-nya itu yang dipotong untuk COVID ini pun juga harus dipikirkan bagaimana supaya perputaran ekonominya itu bias terjadi. Salah satu. Tadi Pak Ketua bilang bahwa ada 3 yang akan diturunkan sebagai penanganan COVID ini, seperti misalnya didalam bulan bakti nelayan missal pembagian sembako. Bisa tidak kalau seandainya sembakonya ini khusus misalnya NTT, jangan bawa dari luar, dari Jawa untuk masukin ke NTT dibantu ke nelayan itu. *Why not?* Kenapa tidak membeli dari petani-petani maupun nelayan-nelayan untuk itu yang dibantu untuk CSR-nya seperti itu. Jadi saya rasa, saya lebih meminta Pak Menteri untuk membuat programnya itu lebih ke bagaimana ... itu.

Jadi yang terakhir Pak Menteri, saya ingin. Memang secara ini saya sudah baca. Dari kemarin saya sudah dapat datanya, saya sudah baca. Tetapi saya lebih mau seperti yang nyatanya seperti apa dengan KKP. Stimulus ekonomi yang akan dilakukan KKP bersama 3 Kementerian yang nyata *real* dibawahnya sampai ada tadi yang teman-teman kita bilang ada yang tumpang tindih atau yang lainnya.

Itu saja Pak Ketua.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Julie.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PKB, Ibu Luluk. Jangan panjang-panjang Bu, jelas, singkat.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Dengan saya ya Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Oh dengar sekali.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati. Semoga semuanya sehat.

Saya juga tidak akan berpanjang. Yang pertama, saya khawatir kalau nasibnya nelayan kami yang kebetulan bukan nelayan laut itu Pak Menteri. Lagi-lagi tidak banyak yang memperhatikan. Jadi tolong sekali, ada didalam perencanaan Pak Menteri yang terkait dengan nelayan waduk. Mereka sebagiannya juga tidak bias turun karena yang pertama alat untuk menangkapnya itu mereka tidak punya, sebagian masih pakai ban. Yang kedua, dalam kondisi yang seperti sekarang mereka harus nyambi Pak Menteri. Jadi kalau tidak bisa turun, mereka juga jadi buruh tani. Nah ternyata ada juga kondisi dimana nelayan kecil itu juga menjadi bagian buruh tani. Sementara menjadi buruh tani juga pekerjaannya sedang tidak ada.

Terus yang kedua, saya juga lihat tadi Pak Ketua disampaikan ada beberapa item yang terkait dengan Baksos yang berbeda-beda itu ya, yang ada bulan karantina dan lain-lain yang kemudian salah satunya saya lihat disitu ditujukan untuk ojol.

Mohon maaf Pak Menteri, bukan saya tidak setuju. Cuma beberapa kali saya melihat bahwa hampir semua Kementerian itu punya Baksos yang ditujukan kepada ojol. KKP dengan ojol, Kementan bahkan juga dengan ojol, bahkan dengan mitra teman-teman kita yang lain juga ojol. Sementara Kementerian yang lain mungkin tidak berpikir seperti kita memikirkan para nelayan dan juga para petani kita, atau bahkan para buruh tani dan juga nelayan yang kecil-kecil kita. Nah kita minta penjelasan saja dari Pak Menteri, apakah ojol ini memang menuansai ini diharuskan bisa mengcover mereka ataukah hal yang lain.

Terus yang ketiga yang terakhir, saya baca mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Yang terkait dengan stimulus ekonomi yaitu pengurangan bea masuk bahan baku pengalengan ikan. Yang mana pengalengan ikan ini sebenarnya hanya 3 yang utama yaitu ikan yang makarel dan seterusnya. Yang itu rata-rata ikannya pun juga impor. Yang nuwun sewu Pak Menteri, kira-kira stimulus ini tepat apa tidak ya. Karena memang perusahaan-perusahaan pengalengan itu mungkin tidak terlalu terkait dengan nelayan-

nelayan kecil kita karena mereka pengusaha besar, punya nama-nama besar seperti ABC, dan seterusnya tapi masih menikmati stimulus ekonomi itu.

Nah apakah tidak kemudian stimulus ini seperti yang disampaikan oleh teman kita yang lain tadi bagaimana bisa benar-benar memperkuat daya tahan para nelayan, buruh-buruh kecil kita disektor perikanan itu dalam menghadapi pandemic COVID dan pasca COVID itu pada saat nantinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mba Luluk.

Tadi disini kan dijelaskan, masyarakat konsumen produk perikanan yang individu. Yang tadi ditanyakan, kenapa harus ada ojol. Yang tidak ada ojol juga tidak ada masalah. Ini kan ada Pondok Pesantren, tenaga medis yang merawat pasien *COVID-19*. Jadi jangan terfokus daripada ojol saja.

Selanjutnya Pak Ansy lema.

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Baik Pak Ketua.

Terima kasih.

Selamat siang Pak Menteri, dan jajarannya,

Pak Menteri,

Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi. Tampak sekali dari materi yang dibagikan keberpihakan Pak Menteri itu kuat. Terutama kepada para nelayan dan juga sector usaha perikanan. Point pertama yang ingin saya soroti adalah menyangkut rencana kegiatan KKP dalam pemulihan ekonomi akibat pandemic *COVID* Pak. Disitu disebutkan perlu akselerasi atau percepatan pemulihan ekonomi untuk nelayan dan sector usaha perikanan. Dan bantuan terbesar itu dialokasikan untuk bantuan bioflog sebanyak 395 paket dengan nilai nominalnya sebesar 78,2 Miliar. Saya ingin katakan Pak pengalaman saya pada saat Reses. Pemberian bioflog ini, ini harus mensyaratkan penerima itu adalah berbadan hukum. Di NTT itu Pak sangat sulit sekali Pak. Di Kota Kupang saja untuk mendapatkan penerima bioflog yang berbadan hukum itu tidak mudah.

Nah karena itu mungkin ini perlu ada kebijakan yang lebih longgar tanpa harus menggampangkan tetapi ini juga bisa ditanyakan kepada Asosiasi, bisa ditanyakan kepada Pemerintah Daerah dan juga Anggota DPR

RI yang memang juga mengetahui mana-mana saja yang harus menerima bioflog ini.

Yang kedua Pak Menteri terkait dengan penerima bantuan KKP harus mempunyai e-Kusuka atau Elektronik Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan. Itu ada di halaman 22 Pak. Nah syaratnya ini tentu tidak mudah. Dipenuhi oleh para nelayan kita Pak. Apalagi penerima bantuan social ini kita tahu adalah rakyat berpenghasilan rendah, dan mereka yang masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. Nah kita tahu bahwa kapasitas atau pun teknologi internet kita, akses internet kita ini belum sepenuhnya merata Pak. Nah ini mungkin perlu dipikirkan, apakah ada kebijakan yang khusus, alternative kebijakan. Sehingga jangan sampai maksudnya baik, tetapi tidak tepat sasaran. 2 point utama yang saya sampaikan ini adalah pentingnya akurasi data. Data yang akurat dan *valid*. Dan kalau memang KKP belum ada bisa bekerjasama dengan Pemda, dan juga bisa bekerjasama dengan Anggota DPR RI.

Yang ketiga Pak terkait dengan pembelian produk perikanan oleh BUMN. Saya kasih jempol Pak, mantap ini. Ini sinergi yang bagus, tetapi jangan hanya BUMN Pak. Kalau boleh KKP itu menjadi off taker juga sehingga kemudian para nelayan kita ini memiliki rasa tenang. Mereka setelah melaut mereka punya ikan itu tidak mubajir. Nah tadi ketika awal Pak Ketua sudah bicara soal Maluku Utara, Morotai yang meminta *cold storage*, di NTT juga, di Kupang Pak. Jangan sampai ikan-ikan ini kemudian dikuburkan Pak. Nah karena itu mungkin kongkrit *cold storage* juga dibutuhkan oleh Nusa Tenggara Timur Pak.

Yang terakhir, terima kasih Pak walaupun urusan tentang *COVID* tetapi KKP tetap menjaga laut kita. Saya kira soal *illegal fishing* tetap harus kencang Pak. Karena para pencuri ini kan pasti memanfaatkan kondisi kita yang lengah Pak.

Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan.

Terakhir salam hormat buat Pak Menteri, dan juga buat nyonya di rumah Teh Iis.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang selanjutnya yang mewakili Fraksi PPP. Pak Asep Maoshul.
Pak Kyai Asep.

F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua dan juga Pak Menteri, serta rekan-rekan yang lain.

Pada kesempatan ini, kita sama-sama tahulah akibat pandemi *COVID-19* ini jelas banyak dampaknya, banyak keluhan dari para nelayan khususnya yang ada di Pangandaran Jawa Barat, antara lain harga ikan hasil tangkapan mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu terjadi lantaran ikan yang ... diekspor saat ini cenderung lebih dipersulit.

Jadi ada kesulitan. Mungkin ada prosedur-prosedur lain. Penurunan harga ikan ... ini mencapai 30 sampai 40 persen Pak. Jika pandemic berkepanjangan dan pemasarannya terhenti nelayan juga tentu akan terhenti pula. Dan harga jual ikan ekspor pun dikhawatirkan lebih anjlok lagi. Nah pada kesempatan ini, pertanyaan atau tanggapannya adalah:

1. Bagaimana solusi konkrit Pak Menteri terhadap hal tersebut. Agar harga ikan ekspor tidak mengalami penurunan atau tetap stabil. Mengingat ini sebagai mata pencaharian dan kesejahteraan para nelayan.

2. Untuk usulan stimulus ekonomi sektor KP terkait pembelian produk oleh BUMN Perikanan yang ada di slide halaman 22. Diharapkan harga ikan lokal dari para nelayan tetap stabil. Karena seiring terjadi pelarangan acara, seperti hajatan atau keramaian lainnya daya beli menjadi berkurang. Tentu kondisi itu berdampak pada penjualan, sebab ikan hanya dibeli oleh sebagian kecil warga saja untuk konsumsi pribadi dan sebagian warung makan.

3. Dengan adanya peluncuran aplikasi belanja ikan online seperti aplikasi ikan segar Indonesia dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam berbelanja ikan karena adanya kebijakan PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar, apakah sudah efektif untuk dijalankan. Karena tidak semua masyarakat melek tentang teknologi. Ini harus diperhatikan juga untuk memenuhi gizi masyarakat ditengah pandemic *COVID-19* ini.

Itu perusahaan pagu anggaran terkait aspirasi atau program KP 2020 yang sudah diusulkan dan harus direalisasikan, didistribusikan kepada masyarakat agar terasa ada perhatian dan lebih saat kondisi pandemic *COVID-19*.

Selanjutnya saya sangat setuju dan acungkan jempol buat Pak Menteri tentang adanya rencana inovasi tentang produksi atau budidaya ikan yang baru. Ini memang satu kesempatan satu peluang yang sangat-sangat bagus dan saya sangat mendukung. Dalam hal ini saya juga ingin menyarankan untuk budidaya ikan ini juga digabung dengan pertanian. Jadi dengan system aquaphonic. Jadi ikannya didapat bioflog itu, tetapi sayuran juga bisa terpenuhi. Dengan demikian kebutuhan gizi dan keperluan. Sebagian sembako per Kepala Keluarga itu bisa terwujudkan.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Slamet Sukabumi, Fraksi PKS. Bukan Slamet bebek.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri, rekan-rekan beserta seluruh Eselon I.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama, memberikan apresiasi yang luar biasa juga kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Sama, disaat ada wabah masih terus menjaga laut kita. Mudah-mudahan ini menjadi apresiasi kita dan seluruh rakyat Indonesia.

Ada beberapa Pimpinan, yang pertama terkait dengan reconfusing anggaran ini. Nampaknya sudah disisir oleh Kementerian. Saya mengusulkan apakah tidak perlu ketemu antara Pimpinan, dan juga Eselon I sebagaimana dulu ketika kemudian kita menyetujui untuk kemudian melakukan realokasi anggaran sehingga ini perlu untuk memastikan beberapa program-program yang memang untuk tujuan Dapil dipastikan bahwa memang masih, kalau pun toh terdampak dari pemotongan berapa, kita perlu tahu pasti. Dan itu pasti forumnya adalah antara Eselon I bersama dengan Pimpinan. Saya mengusulkan itu untuk terjadi.

Yang kedua, saya hanya ingin mempertanyakan kepada beberapa Dirjen yang masuk dalam program prioritas, seperti di Ditjen Perikanan Tangkap. Terkait dengan pemotongan-pemotongan itu sejauhmana urgensi dari perjanjian kerja laut yang juga masih dianggarkan. Kemudian juga penambahan ... bandar, karena hasil yang ada hari ini juga penyerapannya yang sudah ada terjadi penurunan yang luar biasa dari penghasilan para nelayan kita. Kalau betul ditambah, apakah kemudian itu daya serapnya bisa terserap. Jadi masalahnya hari ini tidak hanya diproduksi tapi bagaimana kemudian penyerapan produksi yang sangat rendah. Ini yang kemudian, termasuk juga Ditjen Budidaya. Survey pemetaan itu kalau tidak salah saya lihat ada 5,9 Miliar, apakah itu tidak perlu di reconfusing sehingga nanti pertemuan antara Pimpinan ... itu bisa.

Yang terakhir, saya sangat tertarik dan sangat memberikan apresiasi luar biasa ke Pak Menteri dengan sifat optimismenya tadi, bahwa pertarungan COVID ini akan membawa Indonesia sebagai pemenang. Nah Cuma perlu mendapatkan gambaran yang rinci, tadi belum terinci. Barangkali dipertemuan berikutnya. Langkah-langkah turunannya untuk menjadi optimis itu yang kemudian kita ingin mendapatkan gambaran. Jadi bagaimana ... pemenang. Nah itu yang kita tunggu untuk menjadi sebuah program yang akan juga kita support. Saya setuju dengan sifat optimisme itu hanya brakedown dalam bentuk program ini yang kita tunggu.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih Pak Menteri. Dan salam hormat kami untuk semua rekan-rekan di Kementerian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak T. A. Khalid dari Aceh.

Silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Ketua, Wakil Ketua dan seluruh jajaran Anggota DPR yang saya muliakan, Pak Menteri yang saya banggakan bersama seluruh jajarannya ... (suara tidak jelas).

Saya pribadi sangat kagum dan bangga karena ditengah badai corona kita masih terus KKP bekerja sehingga Alhamdulillah walaupun ditengah gelisah masyarakat terhadap corona namun selalu kita ... dengan Pak Menteri dan teman-teman dari KKP ini.

Cuma pada kesempatan ini Pak, ijin Pak Ketua dan Pak Menteri saya menyarankan ada optimalisasi yang dan optimisnya Pak Menteri dan juga optimisnya kita semua bahwa corona ini pasti akan berlalu. Kita yakin bahwa corona ini pasti Inshaa Allah akan berlalu. Maka oleh karenanya, saya berharap program "gemar makan ikan" ini yang telah kita sepakati bersama apakah dapat segera kita tindaklanjuti sebagaimana yang telah kita sepakati awal. Bahwa kalau kemarin kita mengumpulkan orang, sekarang ikan masuk rumah masyarakat. Nanti kita berharap mitra kita KKP gemari gerobak menjadi gerakan Menteri KKP masuk antar ikan untuk rumah-rumah rakyat yang hari ini tidak bisa keluar. Ini dapat dilaksanakan dalam 3 bulan kedepan. Mengingat kita yakin 3 bulan nantinya mungkin corona segera berlalu.

Kemudian yang terakhir saya hanya menyarankan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman terdahulu menyangkut dengan program KKP yang menyangkut dengan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas para nelayan diseluruh Indonesia. Maka oleh karenanya kita corona boleh saja, kita harus mengantisipasi tetapi program-program Kementerian yang menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak boleh terpengkaskan. Apalagi kita paham bahwa kondisi corona ini yang sangat menjadi perhatian kita adalah kesehatan dan ..., sedangkan di perikanan adalah juga bagian dari penyanggah pangan nasional.

Maka karenanya saya berharap kepada Menteri KKP dan seluruh jajaran, serta kita semua agar program Kementerian yang menyangkut

dengan pemberdayaan para nelayan, peningkatan produktivitas nelayan harus terus dioptimalkan. Inshaa Allah kami yakin, saya yakin corona ini pasti akan berlalu. Sehingga kita punya persiapan-persiapan sehingga disaat kita corona berlalu kita tidak kembali kepada nol. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan kepada Pak Menteri. Inshaa Allah kita doakan kita sehat semua. Kita mengabdikan kepada umat Inshaa Allah menjadi ibadah kita semua.

Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua.

Saya akhiri.

*Wabilluahiratufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Hermanto dari Fraksi PKS. Pak Doktor Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua, Anggota dan Bapak Menteri yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Pak Ketua.

Pak Ketua dan Pak Menteri,

Saya hanya ingin menyampaikan bahwa salah satu prinsip dalam menyusun APBN itu adalah bagaimana mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itulah kita turunkan kedalam Kementerian-Kementerian, kemudian sampailah kita kepada Kementerian Kelautan Perikanan.

Oleh karena itu saya sangat senang sekali apa yang disampaikan Pak Menteri terkait dengan stimulus ekonomi. Nah terkait dengan stimulus ekonomi ini tentunya ini membutuhkan anggaran. Saya minta supaya anggaran yang terkait dengan stimulus ekonomi ini tidak dipotong. Karena tadi Pak Menteri mengatakan akan ada pemotongan anggaran di KKP.

Oleh karena itu alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi ini saya minta supaya bukan hanya di pertahankan jumlahnya tapi juga harus minta

ditambah. Kenapa demikian? Karena kita sekarang ini selain menghadapi COVID dan akibatnya kita tahu bahwa hampir dari seluruh sector ekonomi ini sedang mengalami penurunan.

Oleh karena itu saya minta supaya penambahan anggaran stimulus ekonomi ini sangat baik untuk membuka industri perikanan.

Kemudian yang kedua, tadi Pak Ketua dan juga Pak Menteri telah menyampaikan ada Bansos. Ada 3 jenis Bansos. Saya minta supaya Bansos ini ada segmentasi sasaran. Supaya tidak terjadi overlap. Tadi sudah diulang-ulang oleh Pak Ketua, saya sangat setuju. Jadi segmentasi ini harus bersifat differensiasi supaya ada tingkat distribusi yang beragam terhadap para konsumsi ikan. Sehingga masyarakat kita secara luas bisa mengkonsumsi ikan secara merata.

Oleh karena itu saya melihat supaya ada koordinasi dilapangan. Nah dalam hal ini peran Anggota Dewan itu sangat penting untuk mengarahkan differensiasi dan segmentasi sasaran penerima. Sehingga betul-betul tentunya koordinasi dengan stakeholder yang ada didaerah-daerah terutama di Dapil Anggota. Ini sangat penting supaya tidak terjadi overlap.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan stimulus ekonomi tadi Bapak Menteri sudah menyampaikannya secara bagus. Tapi saya minta supaya stimulus ekonomi ini punya makna yang sangat berarti buat stakeholder yang bergerak disektor perikanan.

Oleh karena itu saya minta supaya Pak Menteri, ketika BUMN-BUMN hendak melakukan pemberdayaan terhadap apakah pembudidaya ataukah tangkap, saya minta supaya pembelian-pembelian ikan itu, anggaran dibelikan untuk ikan itu tidak diarahkan kepada pembelian budidaya ikan yaitu bioflog, budidaya ikan tangkap, dan lain sebagainya itu supaya mendorong Kementerian bisa menghindari terjadinya over stok ikan dilapangan. Sebab saya kemarin mengunjungi Dapil, mengunjungi salah satu dari bioflog ini. Kan bioflog ini sudah masuk ke suasana panen.

Jadi saya minta supaya Kementerian mengarahkan para stakeholder untuk membeli ikan yang dihasilkan oleh budidaya bioflog dan budidaya ikan yang lainnya. Dan ini pun bisa jadi menjadi paket dari 3 jenis program ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Biar bioflog ini memiliki peran juga untuk mendukung 3 jenis program tadi atau salah satu dari program tadi.

Kemudian saya juga mendukung apa yang menjadi sasaran Pak Menteri terkait dengan pemanfaatan tambak-tambak yang menganggur. Ini kaitannya adalah untuk penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu terkait dengan pemanfaatan atau revitaliasi tambak yang menganggur ini. Ini pun juga kami minta supaya Pak Menteri melibatkan Anggota Dewan untuk advokasinya untuk pengawasannya sehingga Anggota Dewan itu betul-betul mencermati apa yang menjadi perkembangannya terkait pemberdayaan tambak ikan ini.

Demikian Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hermanto.

Selanjutnya Pak Muslim.

Setelah itu siap-siap Pak Suhardi Duka, mohon maaf tadi terlewat Pak.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, dan teman-teman Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta jajarannya.

Pertama tentu kita harus memberikan apresiasi ke Pak Menteri. Sudah 27 kapal yang sudah berhasil ditangkap. Saya pikir ini pantang mundur Pak Menteri, lanjut terus. Ini tentu satu hal yang apresiasi yang luar biasa.

Yang kedua, yang berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan kondisi hari ini kan sangat memprihatinkan. Kita bersyukur juga pihak BUMN ini yang ikut membeli ikan. Terus terang Pak Menteri, kondisi di lapangan hari ini memang ini menjadi satu hal yang luar biasa memang. Tentu apa yang Pak Menteri sampaikan hari ini kita harapkan BUMN ini segera terjun khususnya PPI-PPI yang ada didaerah. Khususnya di Aceh Pak Menteri.

Yang ketiga, tentunya harapan para pengusaha perikanan di Aceh Pak Menteri, ini mereka kan ingin naik grade dari C ke B. Kenapa? Karena mereka juga butuh ekspor ini. Tadi saya lihat Pak Menteri begitu semangatnya dalam konteks ekspor, target 13 juta ton ini yang dipenuhi belum ada 1 juta ton. Tentu dalam hal ini kita mohon Pak Menteri mempermudah kepada teman-teman pengusaha didaerah ini supaya mereka diberikan juga keleluasaan dalam bentuk perijinan. Jadi sehingga pasar mereka ini menjangkau di beberapa apakah di Timur Tengah maupun dinegara-negara tujuan pasar.

Yang terakhir Pak Menteri, tentu kita apresiasi program-program yang dilaksanakan oleh Pak Menteri. Tentu yang sangat terpenting dari semua itu Pak Menteri harus tepat sasaran. Kenapa? Karena yang hari ini yang merasakan betul dampaknya adalah para nelayan ataupun pelaku-pelaku usaha perikanan didaerah. Jadi sehingga semua program-program ini tepat sasaran didaerah. Itu sementara Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Selamat siang.

Yang saya hormati Pak Ketua dan teman-teman Anggota Dewan,
Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan jajaran Eselon I,

Kita sependapat bahwa memang kita perang saat ini melawan dengan corona virus, pilihannya hanya 2 jadi pemenang atau pecundang. Saya kira tepat pilihan kita adalah menjadi pemenang. Untuk bisa jadi pemenang saya kira 2 hal. Yang pertama, kemampuan kita untuk mencegah penyebaran virus ini. Langkah-langkah Pemerintah diambil dengan PSBB. Hanya saja sedikit mengecewakan karena ada 2 keputusan Kementerian berbeda yaitu Kemenkes dan Kemenhub.

Yang kedua adalah sejauhmana kemampuan Pemerintah mengatasi dampak ekonomi yang dipaparkan oleh corona virus. Saya sependapat dan memberikan apresiasi kepada Pak Menteri karena ini sudah rapat ke-2. Prinsipnya saya mendukung apa yang menjadi program Pak Menteri dalam memberikan stimulus kepada masyarakat termasuk gemar ikan, kemudian pemberian peralatan sederhana rumah tangga untuk ... ikan. Yang saya minta kepada Pak Menteri, agar Bansos-Bansos kita supaya lebih dipermudah dengan sekarang ini corona virus sulit masyarakat bertemu dengan Pemerintah dan lain sebagainya maka Bansos-Bansos ini dimasukan saja menjadi stimulus. Sehingga dengan demikian kalau sudah masuk menjadi program stimulus persyaratan-persyaratan itu lebih mampu kita sederhanakan. Lebih sederhana persyaratannya.

Jadi banyak hukumnya mungkin sudah tidak ada dan yang lain sebagainya sejauh itu untuk membantu masyarakat. Dan saya kira kalau

masih dalam stimulus bisa bertambah programnya Pak Menteri untuk menjadi bagian daripada stimulus Kementerian KKP kalau Bansos ini masuk.

Dan yang terakhir adalah saya ... juga ada program untuk mobil cold storage. Saya kira berikanlah kepada daerah-daerah yang tidak memiliki cold storage dipelabuhan-pelabuhan supaya bisa menahan keawetan ikan disetiap wilayah. Ya termasuk mungkin di NTT, di Sulbar juga saya kira 1 unit diberikan.

Saya kira demikian.

Terima kasih. Prinsip saya support Pak Menteri.

*Allahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Edward Tannur, silakan.

F-PKS (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Terima kasih banyak Pak Ketua.

Salam sejahtera untuk Anggota Komisi IV, Pak Menteri beserta jajarannya.

Memang menyimak apa yang telah dibicarakan dari tadi, prinsipnya kita semua setuju dengan programnya Pak Menteri. Hanya saya lebih tekankan bahwa setelah terjadi refocussing ini eksekusi dana ke daerah itu harus segera dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai orang sudah mati virus corona baru kita turunkan dananya percuma. Dan juga potensi laut di NTT itu cukup besar Pak Menteri, hanya alat tangkap ikannya yang kurang. Sekarang itu sekedar informasi Pak Menteri, di laut-laut di daerah NTT itu agak kejauhan dari pantai itu sudah ada kapal-kapal besar itu. Jadi nelayan kita kan nelayan kecil, lihat kapal besar takut dia mau kesana. Alatnya juga tidak memadai.

Satu lagi Pak Menteri mengenai bioflog. NTT itu terkenal dengan kekeringan. Jadi kita mau ambil air dimana. Baru-baru saya Reses saya tanya, yang dapat bioflog dari Kementerian Desa. Dia bilang, 2 minggu ganti air, 1 kali bioflog itu diganti. Tempatnya itu 1,5 mobil tangki Rp300.000,- ini kita bisa mati ini. Sementara hasil jualnya tidak mencukupi. Jadi saya usul Pak Menteri, kita dikasih eksa kecil saja jangan besar. Kecil supaya bisa dapat banyak. Di setiap aliran sungai itu kita buat kolam-kolam-kolam, terus disamping tanam sayur juga bisa, untuk kolam ikan juga bisa. Itu lebih efektif. Bioflog saya kira kurang menguntungkan. Kita tidak tahu didaerah lain, tapi di NTT sebaiknya itu. Supaya kita jangan ... air terlalu banyak dengan ... tangki,

bangkrut nanti. Jadi saya hanya usulkan itu secara riil. Kapan eksekusinya, kita siap untuk mendukung.

Terima kasih Pak Menteri dan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Edward.

Selanjutnya Ibu Nur'aeni.

Silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Pak Ketua yang saya hormati, beserta teman-teman lain Komisi IV, Pak Menteri beserta para Dirjen.

Langsung saja ingin saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Kapoksi dan Pak Muslim dari Demokrat. Hanya saya menambahkan, menguatkan beberapa hal yang ingin disampaikan. Tadi yang dipaparkan kaitan percepatan pemulihan ekonomi. Tentu saya juga sangat mendukung sekali. Dari 23 program yang dilakukan realokasi maupun di-*refocusing* tentu saya berharap bahwa bantuan benih yang akan diberikan ini berharap benih ini yang harus bisa langsung bisa dikonsumsi, bukan benih ikan yang kecil-kecil. Karena kebutuhan masyarakat saat ini tentu butuh terhadap pangan termasuk ikan.

Yang kedua, dari beberapa yang disampaikan ada kegiatan padat karya untuk nelayan. Tentu yang ingin saya ketahui, model padat karya ini seperti apa dan nanti pelaksanaannya juga bagaimana. Dan disini juga ada kegiatan kaitan dengan pelatihan masyarakat KP. Nah disaat-saat ini kaitan dengan physical distancing yang memang sudah Pemerintah menyarankan untuk dilakukan *physical distancing*, model yang akan dilakukan ini seperti apa agar jangan sampai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian KKP juga memberikan contoh yang tidak baik kalau menurut saya.

Kaitan dengan stimulus ekonomi dan penugasan. Tentu kami sangat mendukung rencana yang akan dilakukan oleh Kementerian KKP untuk membeli produksi perikanan para nelayan kita. Nah akan tetapi dalam hal pendistribusian serta dalam hal penugasan ini juga perlu dilakukan kolaborasi yang sangat kuat antara Kementerian KKP disamping itu dengan Bulog serta Kementerian Sosial juga. Agar apa? Agar program yang diberikan ini tepat sasaran, dan sesuai dengan data yang dimiliki. Jadi tidak ada tumpang tindih

antara masyarakat nelayan dengan masyarakat yang lain supaya tidak terjadi pemberian yang kedua kali atau tumpang tindih penyampaiannya.

Mungkin itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pimpinan Komisi IV. Pak Hasan Aminuddin.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Ketua dan segenap Anggota, serta Pak Menteri dan segenap para Eselon KKP.

Yang pertama saya sebelumnya pernah menyampaikan sebuah saran. Sampai sejauhmana Kementerian dibawah Pak Jokowi ini mengemban visi dan misi Pak Jokowi ini ada sinkronisasi. Sehingga beban yang begitu berat hari ini bisa dipikul bersama-sama. Tanpa melakukan sinkronisasi antar Mentari pasti tidak akan mampu menjawab keluhan rakyat dan negara tidak akan hadir. Contoh suatu misal KKP. KKP ini kan 4 elemen yang diurus. 1. Nelayan, 2. Pembudidaya, 3. Pengolah, dan 4. Penggaram. Seandainya pembudidaya ini atau nelayan kita urus tentunya Pak Menteri ini melakukan MoU atau sinkronisasi dengan Mendagri, bagaimana Bupati, Walikota seluruh Republik Indonesia dan Gubernur melakukan satu kesatuan langkah dengan Menteri KKP, dengan uang yang sedikit akan dirasakan oleh rakyat seluruh Republik Indonesia.

Saya pernah mencoba Pak Menteri, BNPT disalah satu Kabupatenlah di Dapil saya ini saya lakukan. Bagaimana BNPT itu (Bantuan Non Tunai Pangan) itu memasukan hasil tangkap rakyat di Kabupaten, disalah satu Kabupaten di Dapil saya. Subhanallah begitu bangganya nelayan walaupun dibeli sedikit. Apalagi nantinya Pak Menteri ini melakukan Bansos dengan melakukan sinkronisasi 1 mitralah, dengan Pak Menteri Pertanian, Perhutani. Nah Perhutani ini kan di wilayah hutan, bagaimana mitranya perhutani ini Bansosnya diisi hasil nelayan.

Itulah barangkali saran saya, apakah sudah pernah disampaikan saat melakukan Rapat Paripurna dengan Presiden karena hari ini sebagaimana Pak Suhardi Duka tadi menyampaikan Menteri yang satu dengan Menkonya saling memberikan sebuah Perment. Permentnya yang berbeda. Saatnya sekali lagi Menteri dibawah Pak Jokowi ini ada satu kesatuan mengemban visi dan misinya Presiden, bukan mengemban visi dan misinya Partai Politik. Indonesia hari ini sedang diuji dan bagaimana Menteri ini atau negara ini hadir ditengah-tengah rakyat. Hari ini saya tidak akan berbicara stimulus pasca COVID. Namun hari ini saya ingin bicara bagaimana mengatasi perut rakyat yang hari ini sudah mulai mau emosi. Semoga Indonesia diselamatkan sebagaimana kita mengalami '98.

Namun saya mengutip apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Sri Mulyani. Krisis hari ini, tahun ini akan beda dengan krisis '98. Kalau '98 rakyat masih keluar rumah, hari ini rakyat sudah tidak keluar rumah dan sudah mulai merasakan perut lapar dan negara wajib hadir.

Saya berharap kesimpulan apa yang saya sampaikan, yang pertama segera lakukan sinkronisasi. Bila perlu melakukan terobosan. Ya satu kemitraanlah Komisi IV ini Pak Menteri KKP, Menteri Pertanian dan Ibu Siti Nurbaya, serta BUMN yang lainnya duduk bersama-sama sehingga ada kesatuan langkah duit yang sedikit bisa dirasakan oleh rakyat pada umumnya, prioritaskan Dapil sebagaimana keinginan Anggota Komisi IV.

Sekian Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Slamet Ariyadi anaknya mama Alin.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Abah Sudin, Pimpinan, dan Saudara Menteri yang saya hormati,

Prinsipnya ketika teman-teman hari ini berbicara tentang Bansos. Yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Menteri, berkaitan dengan anggaran yang ada pada Dirjen Pengolahan Ruang Laut ini ada kegiatan prioritas ada 141. Sedangkan Ditjen Penguatan Daya Saing ada 96. Pertanyaan kami tadi menyimak pertanyaan teman-teman Anggota banyak mengeluhkan terkait masalah cold storage dan sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan saya, pertimbangan Pak Menteri hari ini pengembangan usaha garam ataupun pugar dengan nilai 48 Miliar ini apa pertimbangannya? Karena kita sudah lihat bersama bahwasannya harga garam ini kan sangat anjlok. Bahkan sekarang sudah banyak petambak garam yang stop produksi. Kalau boleh saya sarankan, lebih baik untuk masalah PUGAR dialihkan ke Ditjen Penguatan Daya Saing untuk tentang penguatan daya saing produk kelautan atau pun dialihkan kepada *cold storage*. Itu yang pertama.

Yang kedua, hari ini selain berbicara tentang Bansos khususnya di wilayah Madura juga ada pendidikan ataupun SMK Kemaritiman yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan. Tentunya disisi lain kita harus mampu untuk mengembangkan atau pun membantu sekolah pendidikan tersebut untuk ikut andil dalam pengolahan perikanan.

Yang ketiga, terkait masalah. Ini ada stimulus dari Kementerian. Yang saya inginkan bantuan Pemerintah kepada nelayan berupa pembekalan laut. Kalau boleh saya sarankan nanti diusulkan ini mungkin tidak terlalu urgent. Lebih baik dialihkan kepada pengadaan khususnya sarana yang bisa untuk bermanfaat kepada para nelayan misalkan pengadaan GPS ataupun *Fish Finder*, ataupun seperangkat lampu perahu nelayan, ataupun yang bersifat tenaga surya, aki ataupun interventer. Itu yang lebih penting daripada sifatnya berupa pembekalan laut kepada nelayan. Yang jelas nelayan itu sudah bawa bekal Pak Menteri.

Yang keempat terkait masalah KOB peningkatan kapasitas kelompok bersama nelayan. Ini kami minta seperti apa transparansinya. Yang jelas khususnya kelompok nelayan yang ada di Jawa Timur berbicara Madura, ini ada 126 Pulau yang juga Pulaunya sangat produktif bagi perikanan maupun nelayan. Ini mohon bagaimana karena ini juga sebagai jangka panjang juga sebagai langkah untuk bisa mengembangkan perekonomian nelayan dibidang pencegahan COVID ini.

Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan

Terima kasih Pak Ketua dan Bapak Menteri, teman-teman Anggota yang kami hormati.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Slamet.

Selanjutnya Pak Budi, Pimpinan jadi ngomong?
Ada yang mau disampaikan Pimpinan?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tidak. Tadi sebenarnya Cuma sedikit saja kalau memang masih ada kesempatan.

Pak Menteri yang saya hormati.

Terima kasih atas waktunya dan bahan-bahan yang sudah disampaikan. Kami sangat mengerti keadaan yang sedikit sulit. Kami rasakan bersama dan kami apresiasi segala langkah yang sedang ditempuh oleh Pak Menteri beserta jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi saya penekanan saja. Ada *point* dari Pak Ichsan. Pak Ichsan mengatakan moga-moga tidak ada pemotongan-pemotongan misalnya program-program penguatan sumber daya manusia. Cuma saya ingin tadi penjelasan saja. Ini saya rasa pasti sudah mekanismenya sudah dipikirkan, tapi saya ingin tahu pelatihan-pelatihan yang ada yang sudah dirancang melalui program-program misalnya BRSDM ini secara teknis seperti apa, misalnya ada 34.000 paket pelatihan kalau tidak salah, pendidikan untuk nelayan. Itu saya ingin tahu saja, apakah ini sifatnya mengumpulkan banyak orang atau sudah dipikirkan teknisnya yang lebih aman untuk situasi-situasi seperti ini.

Dan juga tadi saya menekankan teknis-teknis juga misalnya untuk pembagian gemar ikan, moga-moga ini bisa sebenarnya saya harapkan ini bisa ditambah secara jumlah karena ingin sekali kita menyalurkannya ke masyarakat di daerah-daerah kita masing-masing.

Saya rasa untuk teknis penyalurannya yang paling baik adalah *door to door*. Kita hindari acara-acara besar apalagi lebih *ceremonial* yang mengumpulkan banyak orang. Semoga ini bisa terlaksana. Dan ini juga tadi saya sangat mendukung upaya Pak Menteri dalam mengencangkan nantinya potensi yang ada di daerah-daerah misalnya udang di Kalimantan Timur itu banyak sekali tambak-tambak udang yang tidak produktif, banyak yang terlantarkan bahkan. Moga-moga ini bisa menjadi catatan bagi KKP dan kita semua untuk sekali lagi memetakan potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih. Semoga Pak Menteri dan jajaran di Kementerian Kelautan diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri,

Tadi sudah ada tanggapan dari Anggota. Sebetulnya yang paling penting Pak Menteri adalah saat ini apabila Indonesia mengirim mengekspor ikan olahan itu pajaknya mencapai 22,5%. Jadi sangat mustahil sekali kita bisa ekspor ke Eropa dengan pajak sedemikian tinggi. Sedangkan apabila ikan olahan dari Vietnam, China, Thailand tidak kena pajak alias 0%. Ini yang

harus diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Melihat pasar tetapi pajaknya kalau ketinggian rasanya berat juga untuk bersaing.

Anggota ada lagi?

Cukup?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Tambahan Ketua.

KETUA RAPAT:

Apalagi, kamu mau ngomong apa Met?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

.... Ini masuk di stimulus. Usulan Pak Menteri Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa itu?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Disini pembelian garam, petambak garam dilakukan oleh BUMN Ketua. Yang kami inginkan untuk melihat masalah standarnya Pak Ketua.

Itu saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu saja?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Tolong Pak Menteri diperhatikan kata-katanya Pak Slamet.

Selanjutnya Mbak Yessy silakan.

F-NasDem (YESSY MELANIA, S.E.):

Selamat sore semuanya.

Saya baru bergabung kembali.

Ijin Pak Ketua dan Pak Menteri yang saya hormati.

Terima kasih untuk waktunya. Tadi saya sudah menyimak beberapa, meskipun sudah hampir 1-2 bulan saya sedikit lewatkan informasi secara spesifik di Komisi IV tetapi saya meng-*highlight* bahwa saya mengapresiasi yang pertama kinerja dari Kementerian Perikanan dan Kelautan bahwa begitu cepat dan kondusif untuk Indonesia. Tadi beberapa kapal asing juga masih sempat ditengah wabah ini masih mampu untuk bekerja maksimal.

Kemudian yang kedua juga, saya hanya ingin menekankan dan memberitahukan kepada rekan-rekan semua dan mungkin juga mempertanyakan kepada jajaran Kementerian bahwa kita saat ini kan ada program di OJK tentang relaksasi kredit. Nah ini saya pikir juga sangat baik untuk bisa dibantu sosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat kita terutama UMKM yang bergerak dibidang pengolahan ikan. Karena kita juga tahu kondisi ekonomi kita juga sangat lemah saat ini dan jangan sampai sudahlah kita tertimpa tangga kemudian pengusaha-pengusaha kita, UMKM kita juga ditagih terus menerus dan juga terkadang *debtcollector* ini agak sedikit nakal, bahkan ada cerita di Dapil saya Bapak/Ibu. Kebetulan UMKM ini bergerak dibidang pertanian.

Jadi mereka ditagih Debt Collector untuk segera membayar padahal mereka sebagai segmen masyarakat yang terdampak secara langsung dari virus corona ini. Ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk bantu sosialisasikan program ini karena program ini juga lumayan baik, bisa membantu secara perekonomian masyarakat kita. Minimal memberikan kenyamanan secara mental, secara psikis masyarakat kita.

Kemudian yang kedua juga saya menyoroti tentang Bansos. Saya juga mengapresiasi bahwa program ini sangat baik tetapi sekali lagi akurasi data dalam waktu singkat ini seperti apa pihak Kementerian menyikapi. Karena kalau kita tahu ini baru-baru ini sudah ada bantuan beras dari Bulog, dan itu di Dapil saya Bapak/Ibu ada yang menerima tetapi kategorinya sudah sangat mampu. Jadi beras Bulog itu bisa dikategorikan percuma dikasih dan bahkan mereka alihkan untuk membuat hal-hal lain, bukan dikonsumsi tetapi lebih dijadikan pakan dan segala macam. Nah itu yang mungkin harus kita pikir, bagaimana supaya data ini rill dan up to date.

Kemudian yang terakhir juga saya menginginkan ada sinergi dari Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia dengan industri-industri yang bergerak dipengolahan ikan untuk dana CSR-nya seperti apa, apakah ada komunikasi secara linear mungkin sampai ke daerah, sampai ke Provinsi, sampai ke Kabupaten, kebawah dana CSR ini bisa digunakan untuk subsidi ikan segar, misalnya kepada masyarakat nanti Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi membeli ikannya itu mungkin dari dana CSR juga bisa yang kemudian dialokasikan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Jadi secara tidak langsung kita sudah mempertahankan tetap eksisnya UMKM kita dan juga masyarakat kita yang terdampak bisa merasakan

membeli ikan karena ditengah-tengah wabah seperti ini, bukan hanya APD saja yang disuarakan oleh masyarakat, yang diteriakan oleh masyarakat ke kita sebagai Wakil Rakyat atau pun ke Pemerintah tetapi juga sembako itu menjadi prioritas yang paling penting.

Mungkin itu saja Ketua dan Pak Menteri beserta jajaran.

Terima kasih atas waktunya.

Selamat sore.

... untuk kita semua.

KETUA RAPAT:

Mbak Yessy sekedar info saja. Bulog tidak pernah mencatatkan nama-nama penerima. Bulog hanya menyiapkan beras Raskinya. Yang menyiapkan nama-nama penerima adalah Kementerian Sosial.

Ada lagi Anggota?

Bu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Yang pertama appreciate kepada Pak Menteri dan jajarannya, dan juga kepada Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakarakaatuh.

Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan bagaimana tentang cluster-cluster untuk udang. Nah saya harapkan juga Pak Menteri memetakan untuk cluster diluar udang. Karena saya pikir *agro ecological* di perikanan itu juga berbeda setiap daerah.

Nah kemudian yang kedua tentang pengolahannya Pak. Jadi industri hilirnya perlu diperhatikan oleh Pak Menteri karena banyak sekali petambak-petambak ikan air tawar kita yang banyak mengalami kesulitan padahal justru problem stunting yang saat ini sangat diresahkan oleh masyarakat ditambah lagi dengan adanya *COVID-19* nah tentu saja ini menjadi problem yang utama. Untuk itu saya harapkan Pak Menteri bisa memetakan kembali selain untuk cluster-cluster udang untuk potensi yang lainnya.

Yang kedua, industri perumahan Pak Menteri. Jadi tadi saya sangat salut sekali Pak Menteri sudah ingin menciptakan lapangan kerja. Nah ternyata tidak mudah karena setiap daerah mempunyai kearifan lokal tersendiri sehingga perlu ada pemetaan yang khusus untuk bagaimana cara mengolah ikan-ikan sesuai dengan keadaan setempat.

Terima kasih, hanya itu.

*Billauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Cukup Bu Endang?

Yang lain Anggota sudah cukup?

Pak Dedy mau ngomong?

Ya silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri dan jajarannya,

Sebagaimana tadi Pak Menteri barusan sampaikan bahwa Rapat Kabinet hari ini anggaran yang telah dikurangi ini kedepan kemungkinan akan bisa dikurangi lagi. Saya memaknainya betapa besarnya keperluan anggaran bagi negara dalam menanggulangi *COVID-19* dan dampak ekonominya.

Oleh karena itu menurut hemat saya, solusi yang harus dilakukan oleh seluruh pengelola anggaran termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melakukan efisiensi belanja rutin. Dari data yang Pak Menteri sampaikan ternyata setelah dikurangi menjadi 5,3 Triliun bahwa konsentrasi belanja di Kementerian Kelautan dan Perikanan 57,85% itu masih untuk belanja rutin. Sehingga saya menyarankan agar belanja rutin ini diefisiensikan, dialihkan untuk kegiatan belanja prioritas.

Yang kedua, kalau kita cermati masing-masing institusi Dirjen ternyata Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah Badan yang masih memanfaatkan anggaran sekitar 32,86% hanya 1,7% dikurangi. Hanya saja disayangkan konsentrasinya itu 66,17% untuk belanja rutin. Ini juga perlu untuk dikaji kembali agar dialihkan ke belanja kegiatan termasuk belanja pada Dirjen Perikanan Tangkap itu 77,5% untuk belanja rutin.

Kemudian tiga Pak Menteri, dari anggaran yang 5,3 Triliun itu hanya 483,6 Miliar atau 9,12% untuk kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak *COVID-19*. Oleh karena itu saran saya tadi belanja-belanja rutin itu termasuk pendukung manajemen itu agar dialihkan untuk menambah pada belanja untuk kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak *COVID-19*.

Terima kasih Pak Ketua dan Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sutrisno.

Nanti efisiensinya gaji pegawai KKP kita potong saja Pak Sutrisno.

Terakhir Pak Guntur silakan.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih.

Pak Menteri yang saya hormati, juga teman-teman Pimpinan.

Ini saya mewakili Dapil kelihatannya kok Pak Mindo, Pak Muhtarom, Pak Ema belum hadir atau rapat di tempat lain. Dapil saya kebetulan mempunyai nilai-nilai khusus karena petani garam tidak ada, nelayan juga tidak ada, tambak juga tidak ada. Kira-kira dalam rangka stimulus ekonomi Pak Menteri yang sungguh baik ini mendapatkan suatu perhatian khusus. Mungkin lewat GEMARI dan yang lain-lain lebih baik.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian pertanyaan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan jawabannya.

Silakan Pak Menteri. Singkat-singkat saja Pak Menteri, ini sudah jam 15.15. Jam 16.00 kita harus pulang.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Ada 24 Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang memberikan penguatan kepada kami, terima kasih atas apresiasi dan dukungannya yang tidak pernah menyerah. Dukungan inilah yang selalu kami harapkan, yang menguatkan kami dalam bekerja di lapangan.

Pak Ketua,

Menanggapi perintah Pak Ketua tadi tentang kesejahteraan ABK PSDKP memang menjadi prioritas kami dari awal. Pada saat dulu di Komisi IV juga saya sudah berusaha keras bagaimana memikirkan ini. Sekarang kami

realisasikan. Namun dalam memikirkan realisasi kesejahteraan ABK ini masih terkait dengan aturan di Kementerian Keuangan yang sudah kami komunikasikan karena dalam situasi yang serba sulit sekarang ini untuk meningkatkan kesejahteraan mungkin belum pas Pak Ketua. Sehingga saya perintahkan Dirjen PSDKP untuk mencari solusinya. Yang jelas ULP dasar (Uang Lauk Pauk), uang pangan utama dia operasionalnya dia jangan dikurangi. Saya yakin Dirjen tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu solusinya Pak Ketua. Sambil berjalan kami akan melakukan secara administrasi. Yang jelas Pak Ketua, kesejahteraan ABK kami prioritas. Karena itu mereka buktikan per hari ini sudah 27 kapal, dan mereka tidak hanya sekedar menangkap tapi juga melakukan perlawanan-perlawanan yang saya yakin Pak Ketua sudah lihat dalam beberapa video rekamannya.

Yang kedua, tentang *cold storage* di Morotai. Memang sudah bersurat, bertelepon kepada kami Bupati Morotai Pak Beni Laos menyampaikan memang harga ikan di tempat Beliau cenderung menurun. Beliau menyampaikan untuk antisipasi, ini menjadi PR. Saya sudah sampaikan ke Dirjen PDS dengan pengurangan ini mudah-mudahan tetap menjadi prioritas. Tidak hanya itu Pak Ketua. Saya juga mendapat surat dari Gubernur NTT yang tadi disampaikan oleh para Wakil Rakyatnya dari NTT tentang bagaimana tindak lanjut di NTT.

Kedepannya kami melihat NTT ini kalau dipaksakan untuk usaha didaratan sangat sulit makanya harus kita ubah menuju laut Pak Ketua. Dan sudah dibuktikan banyak Kepala-Kepala Daerah, Kabupaten NTT, Kota Kupang yang sudah berkomunikasi kepada kami beberapa Kabupaten di NTT dari Manggarai, Manggarai Barat. Mereka menyampaikan bahwa ada langkah-langkah yang strategis. Salah satunya bagaimana penguatan budidaya rumput laut. Rumput laut cukup dengan 45 hari mereka sudah panen. Lahannya sangat luas. Maka itu kedepan khusus NTT kami akan berfokus lagi. Untuk teknis ada beberapa investor sebenarnya yang sudah ingin masuk, hanya mereka butuh tempat-tempat yang penduduknya tidak banyak karena mereka butuh daerah-daerah yang sangat terisolir dalam artian untuk menjaga mutu, tidak terkontaminasi Pak Ketua.

Nah saya lihat salah satu alternatifnya ada di NTT. Nanti akan kami komunikasikan. Mudah-mudahan para Bapak/Ibu, para Wakil Rakyat di NTT. Saya lihat disini ada Ibu. Gubernur, tolong sampaikan kami sudah menerima suratnya Inshaa Allah. Ya memang kondisi lingkungan, kondisi keadaan kita sekarang sedang COVID tapi saya yakin tetap langkah-langkah harus kita lakukan. Beberapa perusahaan yang sudah akan melakukan investasi disektor budidaya, baik itu rumput laut maupun tambak. Saya yakin salah satunya di NTT. Tentang garam, di NTT menjadi salah satu prioritas sejak periode lalu untuk produksi masif garam industri yang saya, kami di KPP masih terus menjajaki potensi-potensi swasta yang berminat.

Yang ketiga Pak Ketua, tentang pajak ekspor memang kita mengalami kendala. Eropa dan Amerika masih menargetkan pajak ekspor. 2 solusi yang akan kami ambil yang pertama, kami akan membangun kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara yang akan kita jajaki untuk bisa

menggunakan nama mereka sehingga kita mungkin ekspornya melalui negara tersebut seperti Timor Leste yang sudah membuka diri maupun ke mungkin Filipina. Walaupun kita tahu sejarah kita dengan Filipina dalam industri perikanan agak sedikit berseberangan karena mereka termasuk yang banyak mengirim pencuri-pencuri ikan ke tempat kita. Tapi Pak Ketua, demi meningkatkan daya saing kita saya siap akan melakukan komunikasi.

Seperti Pak Ketua ketahui, ABK kita yang sudah ditangkap yang kerja sama nelayan Malaysia, bekerja kepada perusahaan Malaysia dengan komunikasi yang baik, dengan Kementerian Pertahanan waktu itu kami berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan akhirnya dibebaskan tanpa tebusan dan komunikasi ini kami harapkan akan merupakan *signal* positif untuk membangun komunikasi lebih lanjut di sektor perikanan yang untuk meningkatkan daya tawar kita, daya jual kita ke Luar Negeri. Hanya saja karena situasi *COVID* sehingga kami mengurungkan untuk mengunjungi beberapa negara Asia Tenggara termasuk yang Pak Ketua sarankan untuk mengunjungi Vietnam khususnya ke Hanoi.

Kemudian Pak Ketua, selanjutnya dengan Pak Haji Sunarna dari PDI-Perjuangan. Memang alur distribusi menjadi permasalahan tapi kita terus mencari solusi dengan jalan keluar juga membangun terobosan selain distribusi secara fisik kita juga melakukan online, kita juga sudah kerjasama dengan bukalapak dan *unicorn-unicorn* lain yang mungkin akan mempermudah termasuk anak-anak muda kita.

Diharapkan ini mungkin menjadi salah satu jalan keluar. Walaupun tidak bisa berharap banyak tapi setidaknya-tidaknya semakin ada jalan yang kita temukan semakin memperingan permasalahan-permasalahan distribusi yang ada. Masalah penurunan panen ikan baik budidaya maupun ikan laut, ikan tangkap.

Kami sudah memperkirakan ini akan terjadi tapi melihat perkembangan dan daya serap yang saya pikir permintaan akan cukup besar nantinya sehingga langkah awal yang kita lakukan bagaimana seperti kami laporkan kemarin bagaimana kita menyiapkan infrastruktur kita dulu. Yang pertama *cold storage* yang sekarang kita terima ada 725.000 ideal di 6 Provinsi. 725.000 ton kapasitas *cold storage* yang masih bisa dimanfaatkan di, ini baru di 6 Provinsi Pak Ketua, belum di daerah Indonesia Timur dan termasuk di Sulawesi. Kalau ini bisa kita manfaatkan dengan potensi bisa kita beli hasil-hasil nelayan ini kita harapkan. Tadi ada disampaikan walaupun sedikit intervensi tapi akhirnya berpengaruh terhadap harga jual dan saya yakin kalau ini di kita manfaatkan semua saya yakin akan besar. Memang potensi uangnya dari mana. Pertanyaan lagi sekali lagi Pak Ketua, bisa juga dari APBN. Sudah kami sampaikan melalui Rapat Terbatas dengan Pak Presiden, sudah kami sampaikan Rapat Koordinasi dengan Menko Perekonomian nanti akan minta dibahas detail, melibatkan BUMN, Pemerintah Daerah dan swasta-swasta yang ada. Yang kedua, darimana juga anggarannya. Bisa juga dari akses kredit melalui KUR itu sendiri lewat pihak ke-3, dan di KKP kita punya BLU (Badan Layanan Umum) yang sekarang kita masih punya uang lebih dari 1 Triliun.

Yang sekarang masih ada di kas kita 1,026 Triliun dengan bunga hanya 3%. Kalau ini kita manfaatkan melalui pihak ke-3, sebagai misal tadi Bapak/Ibu. Kalau tadi ada pertanyaan banyak, da 3-4 kali pertanyaan bagaimana mekanismenya data dengan ini benar. Menteri Sosial sudah punya kapasitas kerjanya, Menteri BUMN sudah punya kapasitas kerjanya, Menteri Keuangan sudah punya kapasitas kerjanya. KKP saya akan fokus dengan apa yang bisa kita optimalkan di sektor kita saja.

Nah kekuatan yang saya miliki disini adalah saya sangat senang karena Bapak/Ibu, Anggota dan Pimpinan Komisi IV ini mau ikut terjun ke lapangan. Inilah kekuatan yang saya yakin kalau kami bisa kerjasama dan bahu membahu. Kalau ditanya data, data itu ada di Bapak/Ibu semua. Bapak/Ibulah yang tahu, bagaimana, dimana, kapan bisa didistribusikan, kapan tempat itu ada.

Makanya tadi tentang apa yang akan kita dorong kalau harga jatuh, kita bisa membeli dengan dana pihak ke-3. Misalnya Bapak/Ibu atau stakeholder yang lain kita bisa gunakan. Kalau pun BUMN yang lain-lain tidak mau menyerap kita bisa melakukan penyerapan dengan pinjaman yang kita fasilitasi dengan pihak ke-3. Memang KKP dengan BLU-nya tidak bisa melakukan eksekusi melalui PDS sebagai misal tidak bisa.

Tapi Bapak/Ibu saya yakin punya jaringan dilapangan, misalnya para pedagang yang butuh modal untuk beli produknya tambak si A, si B, tambak udang, termasuk lele misalnya.

Nah aksesnya mau disimpan dimana? Apakah di *cold storage* terdekat atau cold storage di Kota, atau nanti dimana Bapak/Ibulah yang lebih tahu. Masalahnya pasti di anggaran. Kalau kami akan fokus masalahnya di aturan. Kalau Bapak/Ibu punya kelompok usaha yang butuh anggaran, nanti tinggal di cek dengan dana BLU kita itu bisa diakses Pak Ketua.

Jadi saya sangat yakin ini bisa digunakan dan tidak melanggar aturan. Karena prinsipnya kalau dikeluarkan uangnya ikan ini disimpan di cold storage dia tidak hilang dan tidak akan surut. Harganya pun tergantung harga pasar berikutnya. Dengan situasi sekarang saya sangat yakin harga akan bagus. Jadi Pak Sunarna, itu mungkin salah satu langkah. Langkah-langkah lain saya yakin sambil berjalan.

Pak Darori, terima kasih atas pengertiannya, dukungannya. Refocussing dan masalah prioritas kami siap di Kabupaten yang Bapak tunjuk tadi. Kami butuh langkah-langkah yang Bapak inginkan nanti tinggal berkoordinasi, dan saya berharap para Bapak/Ibu kalau susah berkoordinasi sekarang TA-TA Bapak/Ibu semua bisa berkomunikasi melalui TA-TA kami.

Pak Johan Rosihan, terima kasih atas dukungannya untuk tidak dipotong lagi. Nanti juga akan kami sampaikan. Kami juga tidak akan menyerah. Tentunya kami juga akan melakukan argumentasi-argumentasi yang positif tentunya tidak bermaksud untuk melawan. Saya yakin tadi juga Ibu Menteri Keuangan menyampaikan, itu pun yang akan dikurangi yang

benar-benar tidak ada urusannya dengan tugas pokok. Jadi ada celah untuk memperkuat disektor kita. Mudah-mudahan kita termasuk Kementerian yang nanti tidak dikurangi.

Kalau langkah-langkah insentif untuk petambak garam seperti biasa kita akan membangun di. Melakukan budidaya dengan tetap melakukan fokus geo membran masih kita lakukan. Kemudian penguatan-penguatan termasuk Bantuan Langsung Tunai yang dibolehkan untuk biaya transportasi dari tambak ke lokasi. Sebelum pada waktunya nanti melalui Kementerian PU yang sudah kami koordinasikan untuk membangun jalan-jalan penghubung di daerah tambak ini. Ini sedang kami lakukan Pak Ketua.

Nah langkah-langkah percepatan ekspor banyak yang complain katanya tentang persulitan ekspor dilakukan ke karantina. Kami sudah berkoordinasi dan kami sudah perintahkan karantina dan Alhamdulillah komunikasi pelaku usaha dengan karantina tidak ada masalah. Saya meminta dari karantina kita. Yang biasanya 4 jam melayani itu kalau bisa sudah, baru 2 jam akhirnya disingkat kami berharap kalau bisa 1 jam. Kenapa Pak Ketua bisa lama? Karena memang tempatnya di Pelabuhan rata-rata terpisah. Nanti kami terus berkoordinasi dengan bea cukai, sehingga nanti ada tempat khusus semua ekspor yang masuk untuk perikanan itu 1 pelabuhan sehingga mengeceknya lebih cepat. Dan ini diharapkan bisa 1 jam Pak Ketua.

Jadi persulitan lain sebenarnya bukan masalah. Kesulitannya hanya masalah bagaimana teknis saja Pak Ketua makanya kami melakukan layanan-layanan cepat, online, beberapa wilayah kita lakukan mendekati dengan pasar sebagian misal dimana daerah budidaya kita datangi, dimana daerah yang centra-centra yang akan diekspor kita datangi. Dan ini saya saksi dilapangan Pak Ketua. Saya lihat ada banyak kemajuan.

Namun kalau masih ada ditemukan mohon Bapak/Ibu sekalian berikan kami masukan dimana-mana sehingga kita bisa segera mencari jalan keluarnya. Yang jelas tidak ada keinginan ataupun menghambat, atau mengurangi bahkan menunda mereka untuk mencari sesuatu, sehingga mereka membayar sesuatu. Tidak Pak Ketua. Karena perintah Pak Presiden jelas, bagaimana upaya kita mengekspor sebanyak-banyaknya, bahkan pintu masuk ekspor akan kita perbanyak walaupun pintu impor baru masih tetap di 6 titik Kota Besar.

Masalah potensi PHK Pak Johan Rosihan, sudah kami komunikasikan kepada semua stakeholder di KKP. Kami menghimbau untuk tidak melakukan PHK dan sampai sekarang dalam data kami belum ada. Justru di beberapa stakeholder kami di Dirjen Tangkap kita kekurangan ABK Pak Ketua. Beberapa kapal yang sudah dapat ijin tapi ABK-nya kurang, dari laporan Dirjen Tangkap.

Nah ini kami minta lagi cari jalan keluar. ABK-ABK yang kemarin dari Sabah dikembalikan ke Indonesia, belum 100% kembali tapi sudah baru gelombang pertama yang dikelola dengan kerja sama dengan Menteri Perhubungan, Menkopolkam dan Menteri Luar Negeri. Inshaa Allah kalau

memang ini bisa dilaksanakan ada 4900 ABK yang selama ini ada di Sabah yang kerja dengan nelayan Malaysia. Yang setiap tahun kalau Pak Ketua dengar pasti akan ada penculikan-penculikan dengan Abu Sayap. Nah untuk menghindari itu salah satu cara yang paling mudah kita tarik saja supaya mereka bisa kerja di Indonesia. Sudah ada solusi Pak Ketua dengan dibantu oleh Deputi dari Kementerian Menkopolhukam sudah ada pembagian. Mungkin 1 ABK 1 kapal akan menerima 3. Tinggal eksekusi dan pelaksanaannya Pak Ketua. Namun pas COVID sempat terhenti dan tetap kami anggap ini sebagai potensi sumber daya manusia untuk kita pakai. PHK saya yakin belum, dan kami terus memantau Pak Ketua. Sebagai misal kemarin dengan peraturan ijin pelabuhan perhubungan bahwa ABK-ABK itu harus punya sertifikat melaut, buku pelaut. Jadi itu adalah kewajiban internasional.

Namun saya kemarin karena ini ada 1000 ABK di Tanjung Benoa tidak bisa melaut gara-gara buku pelautnya sudah habis dan sebagian tidak ada. Saya berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, dengan Dirjen Tangkap, dengan Dirjen HUPLA. Alhamdulillah cukup dengan satu gagang telepon bicara Pak Ketua, dispensasi langsung keluar dan 1000 ABK itu sekarang sudah menuju laut Pak Ketua. Alhamdulillah. Makanya kami sangat yakin tidak ada yang bisa kita selesaikan selama komunikasi kita ini kita jalankan.

Kemudian Pak Ichsan Firdaus, terima kasih atas supportnya dan semangatnya. Kami terus berharap masalah bantuan-bantuan ini yakin tidak akan tumpang tindih. Masalah siapa targetnya, makanya kami mohon bantuan Bapak/Ibu semua yang lebih tahu di lapangan. Kami ikut perintah, siap perintah walaupun kami juga sudah punya langkah-langkahnya menggunakan SKPT, UPT, balai-balai kita yang ada di lapangan. Namun demikian itu semua adalah *secondary*.

Yang paling utama kami mohon masukan-masukan dari Bapak, karena saya yakin Bapaklah yang lebih tahu. Masalah SKPT Pak Ichsan, saya yakin tidak mungkin kita tidak laksanakan karena memang SKPT ini adalah ujung tombak di daerah pedalaman, di daerah terujung. Inilah salah satu alat-alat mereka berkomunikasi walaupun dari 15 SKPT ini belum semuanya dibangun tapi SKPT yang kami anggar ini sudah operasional. Sudah ada *cold storage*-nya, sudah ada fasilitasnya, tinggal kita maintenance. Jadi kalau tanpa ada maintenance ini nanti dikhawatirkan tidak akan ada lagi kegiatan-kegiatan yang ada disana. Walaupun kecil tapi kami tetap berusaha ada kegiatan-kegiatan yang berjalan.

Pak Rudi ..., terima kasih nanti mohon datanya. Tidak akan ada 1 Anggota atau 2 Anggota di Dapil. Semua 1 Anggota yang mewakili 1 Anggota, bukan Dapil sudah diwakili 1 Anggota. Kalau ada 5 Anggota ya 5 Anggota dapat hak 5 Anggota tinggal Bapak/Ibu tentukan. Supaya tidak tumpang tindih, Bapak/Ibulah yang menentukan dimana.

Ibu Julie Sutrisno tadi sebagian sudah saya sampaikan. Masalah kegiatan selanjutnya. Sebenarnya yang paling inti khusus NTT Bu, kami ingin membangun lebih kedepan. Saya tahu kalau dipaksakan NTT itu di darat

kemampuan air daratnya sangat terbatas, makanya kita harus balik ke laut menghadap ke laut. Saya yakin disini kita akan bangun banyak hal. Saya percaya dengan kita mengubah pola mainset kita ke laut NTT akan jauh lebih makmur kedepan seperti yang Pak Gubernur NTT sampaikan.

Bu Luluk, masalah ojol Bu Luluk. Saya pikir ini hanya salah satu nomenklatur. Ojol yang kami maksud tidak hanya ojek online. Semua ojek baik online maupun offline itu tetap melakukan. Siapa saja, kalau tidak punya ojol siapa saja. Nelayan di perairan umum, pembudidaya diwaduk-waduk, dimana saja silakan. Jadi kami tergantung usulan dari Ibu. Stimulus ekonomi tentang perusahaan intinya begini Bu, kita melihat perusahaan ini memang sudah kaya. Tapi jangan lupa perusahaan ini menyerap lapangan pekerjaan. Kalau gara-gara situasi ini kemudian mereka semakin sulit jadi takutnya akan ada PHK. Makanya salah satu usulan. Memang kelihatan seolah kita mensubsidi orang kaya. Tapi sebenarnya tidak Bu. Kita berharap dengan ini mereka tetap menyerap industri penangkapan ikan kita, ikan-ikan yang akan mereka kalengkan kemudian mereka juga tidak mem-PHK. Mudah-mudahan walaupun ini baru usulan dan kami sudah berkirim surat kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan melalui Menko-Menko.

Pak Ansy Lema, masalah kegiatan KKP. Saya pikir apa saja yang memang bisa diserap yang Bapak bisa meringankan tugas KKP bagi kami, kami sangat mendukung. Kami tidak terpaku tentang bantuan hukum. Bantuan hukum ini adalah himbauan dan saya harap kalau memang awalnya tidak bisa saya percaya kalau Bapak jamin bahwa orang itu layak diberi kami pun akan siap. Bapak kasih *note* saja bahwa daerah mana, wilayah mana, tapi sambil berjalan saya yakin Bapak/Ibu pasti perlu, dukungan mereka pasti perlu ikatan dengan mereka.

Makanya saya yakin Bapak/Ibu bisa sambil jalan memberikan kemudahan untuk mereka berbadan hukum. Dan saya yakin dukungannya akan semakin mudah dipegang. Kami akan ikut. Dan bantuan hukum dari dulu saya juga termasuk yang juga menolak Badan Hukum. Selama dia masih bisa dipertanggungjawabkan bagi kami tidak masalah. Nanti tinggal. Termasuk yang E-Kusuka tadi juga. Jadi kami tahu tidak semua wilayah punya E-Kusuka tapi tentang digitalisasi ini kan tetap penting merupakan kebutuhan kita kedepan. Saya yakin kalau tidak ada sekarang, suatu saat pasti akan ada. Cuma saya mohon Pak Ansy Lema juga memberikan pembinaan bagaimana tentang digitalisasi tetap menjadi salah satu tujuan terakhir. Tujuan kedepannya bagi pelaku usaha-usaha kita walaupun dia didaerah terpencil.

Jadi tidak menjadi alasan kalau memang tidak E-Kusuka tinggal rekomendasi dari Bapak/Ibu semua akan tetap kami berikan. Kemudian masalah *cold storage* juga kami sudah sampaikan dengan. Sudah ada usulan dari Pak Gubernur kepada kami. Kami akan mengakses dimana kira-kira yang bisa kita lakukan. Dalam anggaran yang sulit, kami akan memprioritaskan mana yang paling prioritas.

Pak Asep Maoshul, sekali lagi masalah ekspor ikan yang dipersulit. Mohon ditunjukkan secara spesifik dimana, sehingga kami bisa melakukan eksekusi atau asesment atau pelajaran-pelajaran dimana sehingga mudah segera kita lakukan. Stimulus ekonomi saya pikir kita sama. Kami akan segera mencari jalan keluarnya. Konkritnya kalau Bapak punya, dimana yang Bapak temukan tolong segera kami beritahu sehingga segera tindaklanjutnya kami lakukan.

Masalah inovasi budidaya ini buat semua Anggota DPR RI, termasuk yang revitaliasi tambak. Kami akan mendengar Bapak/Ibu semua usulan-usulannya dimana. Sekarang memang kami baru melakukan kegiatan, bagaimana melakukannya, eksekusinya. Pertama, pakai anggaran mungkin terbatas tapi kita punya pola lain melalui BLU sedang dalam pemantapan. Kami berharap kalau bisa 10 sampai 12 titik seluruh Indonesia. Ini baru uji coba selama 3 bulan kedepan dan diharapkan kalau berhasil kita akan masif perbanyak. Dan saya yakin Menteri Keuangan kalau melihat hasilnya sangat positif pasti juga akan membantu. Karena berapa pun yang dikucurkan ke situ uang negara tidak hilang malah menghasilkan investasi.

Kemudian Pak Slamet, kalau masalah pertemuan ya kami siap saja tergantung Pak Pimpinan kapan mau kalau diperlukan secara detail. Tapi kami yakin apa yang sudah kami sampaikan ini bukan hanya sekedar cerita atau menyenangkan atau sekedar ingin melalui Rapat Kerja. Kami ingin benar-benar potensi yang dimiliki oleh para Wakil Rakyat di DPR RI ini punya kekuatan yang riil dan kami sangat yakin itu.

Makanya kami sangat berharap Bapak/Ibu semua lebih masif untuk kembali ke Dapil dan kami percaya jaringan Bapak/Ibu lebih kuat. Masalah perjanjian kerja laut sekali lagi memang ini adalah bukan keinginan dari Pemerintah tapi keinginan internasional terhadap keselamatan mereka. Bagi yang belum bisa, tadi sudah saya sampaikan yang sudah ada beberapa kasus yang kita sementara minta dispensasi. Termasuk Pak Sudin Pak Ketua, masalah kepiting bertelur saya juga harus merelakan untuk sedikit mendispensasi pelarangan menangkap bertelur dibulan-bulan yang diijinkan. Bulan Desember sampai Bulan Maret. Karena bulan Desember-Maret kemarin di China ada *COVID* sehingga permintaannya tidak jadi.

Nah mereka minta dispensasi. Tadi pagi saya sudah menandatangani surat untuk memberi dispensasi 3 bulan kedepan penangkapan kepiting bertelur dibolehkan untuk mendorong supaya ekonomi tetap berjalan. Saya pikir kami juga sudah berdiskusi dengan Badan Riset dan Dirjen Tangkap, kemungkinan kepunahan saya yakin masih jauh, dan saya yakin karena perintah Pak Presiden harus memberi relaksasi dan kami lakukan ini. Mudah-mudahan ini sebagai laporan kepada Pak Ketua. Nanti suratnya kalau bisa tolong ditembuskan ke Ketua Komisi.

Kemudian langkah turunannya Pak Slamet sederhana. Optimisme bukan sekedar optimis, kemudian pencitraan tapi tidak. Itu tadi sudah saya gambarkan tentang bagaimana didunia kebutuhannya sangat besar, itu baru 1 komoditas. Luas laut kita, potensi laut kita baru, potensi tempat budidaya

kita baru termaksimalkan 10%. Itu pun belum maksimal. Kalau kita lihat China sudah tidak ada lagi lahan yang bisa dilakukan untuk budidaya. India saya yakin juga tidak sebegus di Indonesia untuk budidaya walaupun mereka sekarang menguasai pasar China terbesar di dunia. Beberapa negara pada saat awal saya jadi Menteri sudah mendatangi saya untuk menyakinkan termasuk China bagaimana pasarnya sangat terbuka buat Indonesia dan tidak hanya menerima pasar, memberikan investasi-investasi walaupun sempat tertunda. Tapi yang jelas mereka sangat terbuka berkomunikasi. Jepang dan beberapa negara Eropa. Ditangkap maupun budidaya sehingga turunannya saya pikir kita harus menguatkan, merevitalisasi yang kita miliki. Tambak-tambak udang kita ada lebih dari 300.000 hektar dan 300.000 hektar ini belum optimal semua bahkan sebagian besar banyak yang mangkrak. Saya yakin di Dapil Pak Ketua juga ada beberapa tambak yang luar biasa potensial tapi mangkrak. Nah ini saya yakin di Kalimantan Timur tadi Pak Wakil Ketua Budi juga menyampaikan.

Saya yakin Bapak/Ibu semua. Saya mohon kalau ada ketemu hal-hal seperti ini mohon diberikan masukan kepada kami untuk tindaklanjutnya kedepan karena pada akhirnya kita harus hidupkan ini. Banyak masyarakat yang mengetahui berasumsi bahwa melakukan tambak udang adalah malapetaka. Karena begitu investasi besar, sekali panen, kemudian tidak bisa tanam karena sisanya adalah penyakit semua. Udangnya mati dan sebagainya. Sekarang kita sudah punya cara Pak Ketua bagaimana melakukan budidaya. Dan ini sudah diterapkan dibanyak wilayah termasuk Sulawesi Selatan termasuk yang paling banyak termasuk Lampung juga sudah banyak. Dan saya yakin juga di Bengkulu dan di beberapa daerah lainnya juga banyak. Dan inilah pola budidaya yang akan kita lakukan dengan pemasukan air yang higienis, kemudian melakukan budidaya dengan air tadi setelah disterilkan. Kemudian air belum bisa dbuang jadi tempat bebas sebelum kita sterilkan lagi sehingga ada pola-pola berbudidaya yang sangat higienis. Kalau ini kita lakukan langkah-langkah ini saya yakin pertumbuhan di sektor ini sangat besar.

Saya yakin Bapak/Ibu Anggota DPR RI kalau menyisihkan sebagian uang Resesnya untuk bikin tambak saya pikir jauh lebih bermanfaat daripada. Ini saya panggilan. Saya hitung memang ongkosnya agak mahal tapi nilai pengembaliannya jauh lebih cepat dan lebih hemat dibandingkan perkebunan-perkebunan. Nanti kapan waktunya kalau mau tahu lebih detail kami siap menjelaskan dengan tim. Dan kami berharap disinilah awal mula yang akan kita lakukan bagaimana melakukan budidaya tambak secara masif. Ini yang Pak Presiden perintahkan.

Tadinya saya mengusulkan ada 8 komoditas tapi Pak Presiden minta 1 dulu komoditas yaitu udang paname. Udang paname memang bukan udang kita Bapak/Ibu sekalian. Udang kita ada udang windu, dan udang merguensis. 2 udang yang kita miliki tidak seproduktif udang paname. Karena udang windu hanya mampu mengisi per meter kubik 60 ekor. Kalau udang paname bisa sampai 200 bahkan sampai 1000 ekor kalau super intensif, tapi saya tidak menyarankan yang super intensif. Yang intensif biasa dengan 200 ekor itu hasilnya sudah 20 sampai 30 ton per sekali panen. Bapak/Ibu bisa

bayangkan kalau harga udang 60.000, atau tidak usah 60.000. 50.000 saja. Saya yakin kita sudah cukup untung, dan ongkosnya jauh lebih produktif daripada perkebunan-perkebunan yang selama ini berputar. Dengan catatan kalau 1 keluarga dulu dibagi 2,5 hektar untuk perkebunan. Kalau sekarang ada proses transmigrasi dengan model pertambahan 1 hektar bisa dibagi 5 KK. Itu sudah luar biasa sejahtera. Tinggal saja bagaimana nanti pelaksanaannya. Yang jelas Pak Ketua dan para Bapak/Ibu semua yang kami hormati, ini langkah awal dari sektor budidaya. Nanti komoditas lainnya seperti yang Ibu Endang sampaikan bagaimana produksi ikan-ikan air tawar, ada. Karena cluster ikan air tawar dianggap sudah mampu rakyat kita dilepas sudah mengerti. Hanya masalahnya pakannya. Pakannya merupakan ongkos terbesar dalam budidaya, 80%. Ini yang akan kita terobos dengan makan-makan tradisional yaitu magot dan lain-lain.

Nah selain perikanan budidaya juga ada perikanan tangkap yang masih sangat ideal potensinya. Sekarang dengan catatan yang kami miliki produksi kita belum sampai 8 Juta. Padahal potensi kita kalau kita tingkatkan 2,5 Juta kali lagi. 2,5 juta ton itu masih sangat mungkin. Lapangan pekerjaan sangat terbuka di sektor ini. Hasilnya pasti akan dimakan oleh orang seluruh dunia. Eropa sudah sulit nyari ikan laut, Amerika juga, termasuk China. Asia Tenggara Indonesia penguasa. Ini yang saya lihat kelebihanannya.

Jadi Pak Slamet saya mau menyampaikan bahwa ini adalah peluang-peluang ini kami lakukan dengan per mudahan-per mudahan ijin dulu, kemudian kita lakukan langkah-langkah strategis. Memang kalau lihat dari anggaran APBN kita tidak akan bisa. 100.000 setidaknya kalau dikalikan 2 Miliar 1 hektar kita butuh 200 Triliun. 10% APBN tidak akan mampu memenuhi itu. Makanya langkahnya adalah kita melibatkan swasta, daerah, investor asing dengan syarat-syarat yang tentunya akan menguntungkan kita. Yang jelas, lapangan tenaga kerja akan terbuka dengan besar.

Ditjen Tangkap, regulasi yang Bapak/Ibu arahkan yang kami laporkan tentang Perment-Perment sekarang sedang tahap finalisasi karena memang Perment tidak langsung Menteri saja yang memutuskan, harus melaporkan kepada Sekab, harus melaporkan kepada Menkumham. Inshaa Allah minggu ini ada 5 Perment yang siap keluar di sektor PRL. Perment lain, tangkap dan lobster dan tentang Krustasea itu mudah-mudahan minggu depan. Kami sangat berharap cepat. Tentunya keputusannya untuk percepatan di KKP dan Tim sudah selesai, tinggal di Kumham dan Sekab. Inshaa Allah komunikasi yang terus terbuka itu akan segera selesai.

Pak T.A Khalid terima kasih. Masalah program gemar ikan. Kami ingin menambah sebanyak-banyaknya tapi kami ingin akses dulu program-programnya.

Kemudian Pak Dokter Hermanto. Terima kasih atas masukannya. Kemudian masalah tambak tadi sudah kami sampaikan. Kami berharap Bapak juga punya data-data yang bisa memperkuat langkah-langkah kami di daerah Bapak atau ditempat Bapak lainnya.

Pak Muslim, terima kasih. Masalah perijinan ekspor saya pikir tadi sudah kami jelaskan. Kami tidak mempersulit, tapi kalau ada yang Bapak temukan biar kami segera cari tahu apa masalahnya.

Pak Suhardi Duka terima kasih banyak. Masalah yang Bapak sampaikan sudah menjadi masukan. Kemudian masalah mobil *cold storage* menjadi catatan.

Kemudian Edward Tannur, tadi sudah kami jawab semua. Tentang bioflog saya pikir Pak mungkin kalau bioflog Bapak minta eksafator kecil kan. mungkin juga selain itu, mungkin didaerah Bapak kalau punya laut fokus juga tentang budidaya selain di keramba jaring bioflog, mungkin ada keramba jaring apung didaerah laut Bapak, atau bahkan rumput laut. Ini juga bisa kita lakukan disitu.

Ibu Nur'aeni, bantuan benih. Saya maksudnya bantuan benih yang besar yang bisa dimakan berarti bantuan ikan ini Bu. Kalau bantuan benih ya untuk dibesarkan, tapi kalau bantuan ikan ya kita nanti ada programnya. Kemudian padat karya yang Ibu tanyakan tadi, kita ada program padat karya, seperti revitaliasi tambak itu padat karya dengan bantu eksafator juga, revitalisasi irigasi, saluran irigasi juga ada, penanaman mangroof, mina padi, kemudian digaram juga ada. Ada beberapa hal nanti mohon Ibu minta TA-nya menanyakan beberapa hal, siapa tahu didaerah Ibu bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak salah dari Banten Ibu kan.

Nah pelatihan-pelatihan masyarakat kelautan-perikanan. Tadi pelatihan kita menggunakan *online* sekarang. Dan ini memang sangat kami butuhkan Bapak/Ibu sekalian. Selalu yang menjadi permasalahan adalah sumber daya manusia kelautan kita, perikanan kita tidak atau kurang memenuhi syarat. Ini yang sekarang kita lakukan. Makanya kami tidak mengurangi sedikit pun dan kita berharap dengan jaringan-jaringan yang kita miliki.

Ada 3 langkah yang kita lakukan menggunakan penyuluh PNS, penyuluh kontrak yang dari dulu Komis IV selalu membela tidak pernah di PHK sampai sekarang sebanyak 2000 orang. Dengan penyuluh mandiri. Jadi ada 3 penyuluh mandiri sebanyak 11.000 database kami. Dan ini kita akan optimalkan dan kita perbanyak, sehingga fokasi-fokasi yang kita lakukan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pelaku usaha, dan para pembudidaya maupun penangkap ikan ini segera terjawab. Makanya dengan keterbatasan. Tadinya kami sudah memesan *simulator-simulator* untuk melaut. Namun karena situasi yang sangat terbatas, kita menggantikan dengan online. Mudah-mudahan ini bisa mendekati. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar.

Pak Hasan Aminuddin. Terima kasih sinkronisasi. Kami komunikasi dengan Pemerintah Daerah. Tidak ada masalah. Selama ini komunikasinya selain dengan Kepala Bupati tapi intensifnya dengan Kepala-Kepala Dinas. Tentang bagaimana mengarahkan tentang anggaran mereka bisa kembali atau memberikan prioritas kepada industri kelautan kita. Itu kembali kepada kebijakan politiknya Pak Ketua Pak Hasan. Kenapa? Sebagai misal nih,

Provinsi Kepulauan Riau. Kita tahu Kepulauan Riau merupakan lautnya yang sangat besar. Tapi coba lihat, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Pak Sudin. Itu anggaran perikanan Kepulauan Riau justru jauh lebih kecil dibandingkan daerah-daerah Kabupaten lain. Ini yang menjadi catatan, lebih besar dari yang kita bantu. Kan tidak lucu. Anggarannya cukup besar tapi untuk khusus perikanan sangat kecil, makanya susah begitu kita hanya menghimbau memerintahkan pastikan tidak didengar.

Nah makanya Pak Hasan, kami berkomunikasi terus untuk bisa menyakinkan dan penelaahan kami selain pendekatan anggaran yang paling kuat nanti pendekatan dengan investasi swasta. Swasta itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang jelas Kepala Daerah melalui Kepala Daerahnya kami himbau, kami anjurkan bagi yang ingin membangun sektor kawasan industri di sektor perikanan. Kalau hari ini bisa kita selesaikan dengan APBN akan kita selesaikan. Tapi kalau tidak kami minta daerah-daerah itu dicatat sebagai kawasan yang disiapkan untuk investasi manakala nanti dari investor swasta dalam negeri, maupun swasta asing akan datang. Ini benang merah yang kami tarik untuk menjadi jalan keluar. Begitu orang lain siap datang mau investasi sudah ada. Jadi ini Pak Hasan.

Kemudian Pak Slamet Ariyadi, 48 Miliar tadinya itu 74 Miliar sebelum dipotong. Tadinya 74 Pak Slamet, namun karena pemotongan akhirnya 48. Kenapa kita putuskan, karena memang sektor inilah yang memang perlu mendapat perhatian detail sebelum kita mencari jalan keluar secara masif kedepan tentang bagaimana meningkatkan produktifitas dan kualitas garam kita. Selalu menjadi alasan kepada garam industri bahwa produksi garam kita NA-nya tidak memenuhi 97%. Diharapkan kita sekarang cari jalan keluar melalui Menristek, melalui upaya-upaya lain. Seandainya produk garam bisa, bagaimana caranya bisa 97 sehingga para pengusaha yang mengimpor garam yang menantang dengan NA diatas 97 kita harus penuhi. Kalau ini bisa saya yakin tidak ada lagi istilah impor garam lagi.

Yang kedua, langkah lain bagaimana kita membangun industri garam kita menjadi garam-garam yang bisa dijual dengan garam-garam untuk estetika seperti spa sebagai misal, makanya 48 M ini sebenarnya sangat kecil, tapi kalau Bapak mau mengusulkan.

Saya pikir kita gunakan dulu yang ada. Nanti manakala tidak bisa kami akan butuh waktu untuk mempelajarinya sehingga pada waktunya akan kita geser. Karena hitungan kami yang ada ini dulu, kami harap diserap dulu dalam perjalanannya kami siap untuk mendengar perkembangan-perkembangan selanjutnya dan arahan-arahan Pimpinan Komisi IV. Dengan PUGAR diganti *cold storage* juga itu menjadi usulan tapi sekali lagi saya mohon waktu untuk menindaklanjuti ini. Karena ini salah satu prioritas yang diminta Pak Presiden. Berapa kali bagaimana menangani kesulitan tentang garam.

Masalah SMK Kemaritiman sudah kami catat oleh Pak Kepala Badan RSDM. Bantuan nelayan tentang pembekalan, *fish finder* dan sebagainya juga sebenarnya sudah ada nanti tinggal kita perkuat. KUB. KUB memang

tidak banyak ya. Kalau di Tangkap ini pemotongannya sekarang ini sudah dalam taraf yang paling optimal. Karena dengan dipotong sampai sekarang sudah tidak ada lagi bantuan-bantuan sosial di Dirjen Tangkap. Mudah-mudahan bantuan sosial sekarang masih ada Dirjen yang lain, termasuk Dirjen Budidaya. Untuk KUB ini kerjasamanya dengan koperasi-koperasi. Pak Budi, pelatihannya tadi sudah kami sampaikan. Dan terima kasih kalau masalah gemar ikan kita juga inginnya lebih banyak. Tapi mohon kita yang ada kita jalankan dulu sambil berjalan kita akan optimalkan penyerapan-penyerapan dengan ini.

Ibu Yessy Melania. Terima kasih atas dukungannya. Relaksasi kredit kita terus mensosialisasikan menjadi satu kekuatan yang kita miliki.

Tentang sekali lagi masalah Bansos, Kementerian terkait sudah punya langkah-langkah. Kami tidak ingin menambah tapi komunikasi kami terus berjalan. Kami akan fokus dengan kewajiban yang ditugaskan kepada kami. Kemudian sinergi dengan industri-industri sudah beberapa kali terus kita komunikasikan. Dari Dirjen Tangkap pernah beberapa kali juga kita melakukan pembagian bantuan-bantuan ke nelayan dengan bantuan juga dari CSR-CSR yang dimiliki oleh mereka.

Bu Endang Thohari sekali lagi terima kasih masukannya. Tentang pengolahan untuk ikan industri perumahan saya pikir sudah menjadi PR yang akan kita dorong. Hanya saja mungkin kalau anggaran terbatas kami akan melakukan yang optimal dulu. Sebagai catatan Bu Endang di Dapil Ibu itu di daerah Cidaun potensi pertambakannya sangat bagus namun belum dikelola. Ini kedepan kami akan jadikan prioritas merupakan daerah tujuan. Tidak hanya di Cianjur Jawa Barat tapi seluruh Pantai Selatan Jawa merupakan potensi besar. Kalau Jawa Barat itu ada potensi tambak 3000 hektar. Kalau seandainya memang ada program anggaran yang cukup untuk kesana. Dan kalau ada swasta sebenarnya sudah siap tempatnya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur juga saya yakin akan lebih lagi. Industri perumahan saya pikir tidak hanya pengolahan Bu Endang. Kami juga sudah punya model pembesaran kepiting dengan apartemen-apartemen kepiting ini kami terus kaji terus kami teliti sehingga manakala sudah siap kami akan melakukan perbanyakkan untuk melakukan produksi pembantu rumah tangga.

Kemudian yang kedua, selain juga produksi tentang pembesaran kita juga memproduksi pakan. Selain magot kami juga punya bagaimana membuat industri pakan ikan untuk benih yaitu cacing sutra. Di budidaya sudah melakukan pengembangan cacing sutra sangat sederhana dan ini merupakan menurut saya terobosan bagaimana di sektor budidaya. Kalau mau berkembang ini juga harus kita perkuat.

Pak Doktor Sutrisno saya terima kasih masukannya. Terima kasih atas dukungannya. Melakukan efisiensi memang menjadi tujuan kami tapi saya terus terang kalau harus mengefisienkan belanja rutin ini adalah kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar yang memang arahan dari Presiden dan Menteri Keuangan ini tidak menjadi hal yang wajib tapi efisiensi dan

penghematan masalah belanja-belanja yang tidak urgent akan kami lakukan. Terima kasih masukannya.

Pak Guntur, siap Pak senior. Bapak tinggal usulkan kemana, kami siap untuk menampung. Ada Pak Mindo juga disitu karena jangan sampai senior-senior ini marah. Kalau senior marah Pa Sudin bisa masuk angin nanti.

Terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi mohon maaf kalau terlalu panjang jawaban saya karena Pak Ketua pasti senang yang panjang. Kalau pendek Pak Ketua akan tidak disukai dirumah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum acara ini kita akhiri, akan kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja hari ini:

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Setelah adanya penyesuaian anggaran menjadi sebesar Rp5.300.705.838.000,- sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Anggota?

Pemerintah?

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar tidak melakukan pemotongan kembali anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 mengingat saat ini pelaku utama perikanan nelayan,

pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasaran hasil perikanan yang terdampak langsung wabah *COVID-19* wajib dilindungi sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program strategis guna menyanggah produksi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak *COVID-19* disektor kelautan dan perikanan.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan kepada Menteri BUMN untuk menugaskan BUMN bidang perikanan antara lain Perum PERINDO, PT Perinus Persero dan PT Garam Persero guna menyerap produksi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman dengan mempertimbangkan kualitas serta stabilitas harga dan memaksimalkan fungsi resi gudang atau sistem rantai dingin.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap memberikan edukasi, jarak jauh atau *online* kepada seluruh *stakeholder* dan pemangku kebijakan daerah serta tetap memberikan berbagai kemudahan bantuan sosial seperti bantuan benih, induk, bibit, rumput laut, bioflog, mina padi, pakan, membran, geoselator bagi petambak garam, dan lain sebagainya kepada masyarakat dan pelaku sektor kelautan dan perikanan.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Demikian rancangan kesimpulan ini. Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini.

Kami persilakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

Singkat, padat Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Kami sangat yakin dibawah pengawasan dan pembinaan dari Ketua dan Pimpinan yang lain, dan para Anggota Komisi IV pekerjaan kami akan semakin mulus dan lancar. Perhatian Pak Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati merupakan semangat kami dalam menjalankan dan mengemban kewajiban kami membela negara tercinta Republik Indonesia.

Terima kasih Pak Ketua.

*Billauitaufiq Walhidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'amin Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.10 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001